

BAB IV
ZIMBABWE PADA MASA PEMERINTAHAN
ROBERT MUGABE (1980-2008)

4.1 Gambaran Umum Zimbabwe pada awal kemerdekaan

Sebelum membahas mengenai Zimbabwe pada masa pemerintahan Presiden Robert Mugabe, terlebih dahulu akan penulis uraikan mengenai keadaan sosial-politik di Zimbabwe pada awal kemerdekaannya. Adapula alasan penulis terkait pengambilan rentang waktu 1980-2008 karena pada masa tersebut Robert Mugabe terpilih menjadi seorang pemimpin di Zimbabwe. Namun, alasan yang paling mendasar adalah pada masa kepemimpinan Mugabe tersebut banyak terjadi peristiwa yang mempengaruhi keadaan Zimbabwe pada masa kini. Sebelum pembahasan mengenai keadaan sosial-politik di Zimbabwe pada awal kemerdekaan, penulis terlebih dahulu akan menguraikan mengenai gambaran umum keadaan geografi dan demografi di Zimbabwe itu sendiri, Karena ketika berbicara mengenai suatu kawasan, maka pemahaman aspek geografi dan demografi wilayah tersebut merupakan kebutuhan yang sangat mendasar. Aspek geografi dan demografi ini termasuk yang memiliki pengaruh yang besar pada perkembangan sejarah kawasan tersebut.

4.1.1 Kondisi geografis dan demografi Zimbabwe

Zimbabwe merupakan negara yang berada di wilayah benua Afrika bagian selatan. Sebelah utara wilayah Zimbabwe berbatasan dengan Zambia dan Mozambique, sebelah timur berbatasan dengan Mozambique, sebelah selatan dengan Afrika Selatan dan sebelah barat berbatasan dengan Botswana, Namibia dan Zambia. Zimbabwe tidak memiliki garis pantai dan diapit oleh sungai Limpopo di selatan dan sungai Zambezi di utara. Secara geografis, Zimbabwe terletak pada garis 20° 0'0" LS dan 30° 0'0" BT.

Bentangan alam Zimbabwe reliefnya bervariasi, terdiri dari dataran tinggi (*High Veld*) yang memiliki ketinggian lebih dari 1200 meter di atas permukaan laut meliputi sekitar 20% dari wilayah Zimbabwe. Dataran tinggi ini berupa sabana, yang terbentang dari timur laut hingga barat daya. Ditengah zona ini terdapat kawasan *Great Dyke* sepanjang 500km yang banyak mengandung mineral. Disekitar kawasan *High Veld* terdapat wilayah yang melandai dengan ketinggian 900-1200 mdpl, dan dilanjutkan dengan wilayah yang tingginya kurang dari 900 mdpl yang dibentuk oleh lembah Zambesi, Limpopo, dan Sabi. Untuk memperjelas mengenai gambaran geografi Zimbabwe, penulis telah menyertakan peta di bawah ini:

Gambar 4.1
Peta Zimbabwe



(Sumber Gambar: www.zimbabwemap.facts.co)

Zimbabwe terbagi menjadi delapan provinsi dan dua kota yang berstatus setingkat provinsi, yang terdiri dari:

1. Harare,
2. Bulawayo,
3. Manicaland, yang beribu kota provinsi di Mutare.
4. Mashonaland Pusat, yang beribu kota provinsi di Bindura.
5. Mashonaland Timur, yang beribu kota provinsi di Marondera.
6. Mashonaland Barat, yang beribu kota provinsi di Chinhoyi.
7. Masvingo, yang beribu kota provinsi di Masvingo.
8. Matabeleland Utara, yang beribu kota provinsi di Lupane.
9. Matabeleland Selatan, yang beribu kota provinsi di Gwanda.
10. Midlands, yang beribu kota provinsi di Gweru.

Zimbabwe memiliki kekayaan yang berlimpah, mulai dari barang tambang hingga hasil pertaniannya, menurut David Coltart (2008, hlm. 4) mineral yang dimiliki oleh Zimbabwe meliputi besi, nikel, platinum, batu bara, krom, asbestos, berlian, dan emas. Dari seluruh tanah di wilayah Zimbabwe, hampir 60% wilayahnya diselubungi oleh batuan granit, dan didalamnya terkandung hampir 90% mineral yang dimiliki oleh Zimbabwe. Bahkan produksi emas di Zimbabwe bisa mencapai 20 ton per tahun.

Tabel 4.1: Bahan tambang yang dimiliki oleh Zimbabwe

No	Bahan Tambang	Produksi per Tahun (Ton) *	Cadangan (Ton) *
1.	Platinum	2396 ribu	2,8 Milyar
2.	Emas	20	13 Juta
3.	Krom	700 ribu	930 Juta
4.	Nikel	9000	761 ribu
5.	Batu Bara	4,8 juta	26 Milyar
6.	Berlian	-	16,5 juta

*Tahun 2004

(Sumber: Basic Info Negara Republik Zimbabwe, Kedubes RI di Zimbabwe, 2005)

Mayoritas tambang-tambang yang ada merupakan peninggalan dari kolonialisme Inggris di Zimbabwe dan sebagai bukti bahwa kedatangan Inggris melalui Cecil Rhodes adalah untuk mencari hasil tambang, dan

Zimbabwe termasuk ke dalam negara yang mempunyai cadangan tambang yang melimpah, hal tersebut yang akhirnya dimanfaatkan oleh Cecil Rhodes untuk membuka koloninya dan membuka perusahaan dagang bernama *British South Africa Company* dan mendapatkan mandat dari Kerajaan Inggris untuk mengurus industri dan pertambangan yang ada di Zimbabwe atau dahulu bernama Rhodesia yang mengambil dari nama Cecil Rhodes.

Selain memanfaatkan sektor pertambangan, wilayah Zimbabwe pun dimanfaatkan untuk sektor pertanian, mayoritas lahan-lahan pertanian dimiliki oleh penduduk kulit putih, dan penduduk pribumi hanya memiliki sebagian kecil lahan dan lahan tersebut bukanlah lahan yang subur, sehingga membuat penduduk pribumi banyak yang bekerja pada petani kulit putih yang memiliki lahan pertanian yang luas dan subur. Hal tersebut dipengaruhi oleh kedatangan penduduk Inggris yang diawali oleh Cecil Rhodes, dan kemudian disusul oleh orang kulit putih yang mencari peruntungannya di Zimbabwe. Para pendatang tersebut kebanyakan membuka lahan pertambangan namun tak sedikit pula yang membuka lahan pertanian dan menempati tanah-tanah yang subur, dikemudian hari para pendatang tersebut menjadi tuan tanah, dan para petani pribumi menjadi pekerja-pekerja di tanah mereka.

Tingkat pertumbuhan penduduk di Zimbabwe cenderung relatif tinggi dengan 3% per tahun pada tahun 1960 dan 1970. Namun pasca kemerdekaan pada periode tahun 1980-1983 tingkat tingkat kelahiran menurun diakibatkan adanya beberapa konflik yang terjadi. Sejak tahun 1991 tercatat peningkatan angka kematian penduduk di Zimbabwe dari 10 per 1000 jiwa pada tahun 1985 meningkat menjadi 25 per 1000 jiwa dari angka populasi penduduk 12.576.742 pada tahun 2002/2003 jumlah yang sedikit dibawah angka kelahiran penduduk Zimbabwe dimana angka kelahiran pada tahun tersebut mencapai 27 per 1000 jiwa.

Tingginya angka kematian di Zimbabwe disebabkan HIV/AIDS, kemiskinan dan malnutrisi, bahkan menurut Coltart (2008, hlm. 01) kematian yang disebabkan oleh tiga faktor tersebut mencapai 3500 jiwa per minggunya. Tingginya angka kematian penduduk di Zimbabwe

mengakibatkan penurunan tingkat populasi dari 12.576.742 pada tahun 2003 menjadi 11.350.111 pada tahun 2008. Penduduk di Zimbabwe didominasi oleh warga kulit hitam yang hampir mencapai 98% dari jumlah penduduk yang ada. Dan sebagian besar penduduknya adalah etnis Shona yang terdiri dari 71% dari populasi, yang kedua adalah etnis Ndebele yang terdiri dari 16% dari populasi dan 11% suku-suku lainnya yang terdapat di Zimbabwe. Selain itu ada terdapat sedikit orang non-Afrika sekitar 2% yang meliputi orang Eropa, Asia, dan Lain-lain (Ensiklopedia Indonesia, 1996, hlm. 263).

Para penduduk kulit putih berdatangan semenjak Checil Rhodes membuka kantor dagangnya di Zimbabwe, mereka datang untuk mencari peruntungan dikarenakan oleh kantor milik Rhodes bekerja pada sektor pertambangan yang pada saat itu menjadi bisnis yang menjanjikan. Mayoritas yang datang ke Zimbabwe adalah bekerja dipertambangan, namun ada juga yang datang sebagai perwakilan kerajaan Inggris di Zimbabwe, ada pula yang kemudian memiliki lahan-lahan yang digunakan untuk pertanian. Dalam perkembangannya selain dalam hal ekonomi, penduduk kulit putih pun menjadi aktor penting dalam pemerintahan Zimbabwe, terbukti dengan Ian Smith yang menjadi Perdana Menteri Rodhesia (Zimbabwe). Walaupun penduduk kulit putih menjadi minoritas, namun mereka memiliki kontrol yang besar terhadap berbagai aspek di Zimbabwe, mereka menguasai sektor ekonomi, dan juga sektor pemerintahan.

Mayoritas penduduk Zimbabwe adalah penduduk kulit hitam yang mendiami kawasan Zimbabwe sejak ribuan tahun yang lalu, mereka terdiri dari berbagai macam suku yang mendiami wilayah tersebut. Dari berbagai suku tersebut terdapat dua sukuyang menjadi mayoritas di Zimbabwe, yaitu suku Shona dan suku Ndebele. Suku Shona merupakan suku terbesar yang terdapat di Zimbabwe, jumlah penduduk yang berasal dari suku shona lebih dari 50%. Selain terdapat di Zimbabwe, suku Shona pun tersebar di negara Zambia dan Mozambik, namun jumlahnya hanya sedikit, tidak lebih dari 3% dari jumlah yang ada di Zimbabwe. Di Zimbabwe sendiri suku Shona terdiri dari beberapa sub-grup yaitu Zezuru, Korekore, Manyika, Karanga, Ndau dan Kalanga, walaupun terdiri dari beberapa sub-grup tetapi mereka memiliki

kesamaan atau kemiripan dialek bahasanya (Mlambo, 2014, hlm. 3). Pada dasarnya suku Shona bermata pencaharian sebagai petani tradisional namun kemudian ikut juga dalam pertambangan, khususnya emas. Suku Shona memiliki rumah tradisional yang berbentuk bulat dan setiap bangunannya memiliki fungsi khusus, dari hasil kerajinannya juga memiliki kualitas yang baik berbentuk patung dari bahan batu dan juga tembikar.

Ndebele merupakan suku yang menempati beberapa wilayah di Afrika Selatan dan juga wilayah Zimbabwe, yang berada di Zimbabwe berbeda dengan yang berada di Afrika selatan, dan dibedakan menjadi Ndebele Utara yang berada di Zimbabwe dan juga Ndebele Selatan yang berada di Afrika Selatan. Di Zimbabwe sendiri jumlah anggota sukunya hanya berkisar 16% . mayoritas suku Ndebele berada di Provinsi Matabeleland Utara dan Selatan. Persentase sedikitnya jumlah penduduk yang bersuku Ndebele merupakan dampak dari peristiwa berdarah yang terjadi di Matabeleland pada tahun 1983. Suku Ndebele sendiri ada yang ikut terjun ke dunia politik, yaitu Joshua Nkomo.

Sebagian besar penduduk Zimbabwe tergolong miskin dengan tingkat persentase 80%. Negara ini juga terkenal dengan berbagai suku seperti Zulu, Vadoma, Shona, dan Lemba. Mayoritas penduduknya adalah penduduk kulit hitam dan kepercayaan mayoritas Negara Zimbabwe adalah Animisme yang dianut oleh 40% warganya, agama Kristen dianut sekitar 30% oleh warganya dan kepercayaan lainnya sebesar 30%. Hal tersebut menandakan bahwa pengaruh dari kolonisasi Inggris di Zimbabwe tidak hanya mempengaruhi sektor politik, melainkan mempengaruhi juga sektor sosial dan budaya salah satunya rohani.

4.1.2 Kondisi Zimbabwe pada awal kemerdekaan

Pada masa awal kemerdekaan Zimbabwe, banyak permasalahan yang harus diselesaikan, mulai dari kepemilikan lahan yang mayoritas dimiliki oleh petani kulit putih, dan para petani pribumi hanya memiliki lahan yang sedikit dan tidak produktif, para petani pribumi pun tak jarang harus bekerja dilahan petani kulit putih untuk dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, selain dari

perekonomian, terdapat masalah dari politik, sebelum kemerdekaan Zimbabwe, sudah terdapat pemerintahan namun tidak diakui yang dipimpin oleh Ian Smith, dan hal tersebut menjadi masalah ketika Robert Mugabe dipilih sebagai perdana menteri, banyak pihak khawatir apabila Mugabe dalam memilih anggota pemerintahan yang malah membuat situasi politik menjadi lebih runyam lagi.

Lahan-lahan pertambangan masih banyak yang belum tergarap dengan optimal, sehingga pendapatan negara masih kurang maksimal, ditambah lagi dengan pertanian yang masih timpang walaupun dapat mendongkrak perekonomian negara namun tidak dengan penduduk pribumi yang masih miskin. Banyak dari mereka yang harus tinggal di rumah-rumah yang berdempetan dengan penduduk miskin lainnya, tanah yang mereka miliki untuk lahan pertanian pun bukanlah tanah yang subur, dengan curah hujan yang normal saja hasil pertaniannya sedikit, apalagi dilanda musim kering yang sangat menyiksa petani pribumi.

Perkembangan Zimbabwe ditandai dengan kemerdekaannya pada 18 April 1980 dari Britania Raya. Dengan ditandatanganinya Perjanjian "Lancaster House Agreement" yang disepakati pada 21 Desember 1979 yang ditandatangani oleh Bishop Abel Muzorewa yang mewakili Rhodesia (Zimbabwe) dan Ian Smith yang merupakan perwakilan dari Inggris (Preston, 2004. Hlm. 25). Pada tahun 1982-1985 terjadi kerusuhan yang diakibatkan perpolitikan yang melanda salah satu daerah di Zimbabwe, yaitu matabeleland menyebabkan jatuhnya korban jiwa yang tidak sedikit, jumlahnya mencapai 20.000-30.000 (Onslow, 2011, hlm. 6) dan berlangsung bertahun-tahun yang membuat kondisi masyarakat semakin memprihatinkan.

Selain hal tersebut, menurut Adnan (2008, hlm. 101) Zimbabwe mendapatkan bantuan dari kerajaan Inggris untuk pembangunan sarana pendidikan dan juga perumahan bagi penduduk yang miskin dan korban perang, mereka menggunakan lahan yang sempat ditinggalkan oleh penduduk ketika terjadi peperangan kemerdekaan.

Masalah sanitasi pun menjadi permasalahan yang melanda Zimbabwe, banyak warga yang mengalami masalah kesehatan, namun masih kurang

sarana prasarananya, namun dalam hal pendidikan Zimbabwe sudah memiliki beberapa Universitas yang memadai untuk melangsungkan proses pembelajaran yang sangat diperlukan bagi negara yang baru berdaulat tersebut.

4.1.3 Peran Robert Mugabe dalam kemerdekaan Zimbabwe

Sebelum membahas mengenai perjalanan karir Robert Mugabe dalam kemerdekaan Zimbabwe sampai menjadi perdana menteri, terlebih dahulu penulis akan membahas mengenai awal ketertarikan Robert Mugabe terhadap dunia politik. Robert Gabriel Mugabe yang lahir pada 21 Februari 1924 di Kutama, Distrik Zvimba, Provinsi Mashonaland Barat, Zimbabwe. Ayahnya bernama Gabriel Mugabe Matibiri adalah seorang tukang kayu. Mugabe berkuliah di South Africa's Fort Hare University di Afrika Selatan dan lulus pada tahun 1951 dengan predikat Bachelor of Arts. Kemudian melanjutkan kembali studinya ke Inggris di University of Oxford pada tahun 1952, Salisbury tahun 1953, Gwelo tahun 1954, dan Tanzania tahun 1955-1957. Dimana dalam menempuh pendidikan-pendidikannya itu Mugabe berhasil memperoleh enam gelar yang terdiri dari Bachelor of Administration dan Bachelor of Education dari University of South Africa, dan Bachelor of Science, Bachelor of Laws, Master of Science, dan Master of Laws, yang berasal dari University of London External Programme (Handanu, 2010, hlm. 28-29). Setelah usai menempuh ilmu Mugabe kemudian berkuliah di Chalimbana Teacher Training College, di Zambia dari tahun 1955–1958, sesudah itu Mugabe mengajar di Apowa Secondary School di Takoradi, Ghana (1958 – 1960). Di negara inilah jiwa berpolitik Mugabe mulai terbentuk, dimana dia banyak terpengaruh dan terinspirasi oleh Kwame Nkrumah yang merupakan perdana menteri Ghana kala itu.

Sekembalinya Mugabe di Zimbabwe dia bergabung dengan National Democratic Party (NDP) tahun 1960 (Olson dan Shadle, 1996, hlm. 764). NDP diketuai oleh Ian Smith, yang kemudian digantikan oleh Joshua Nkomo dan mengubah nama National Democratic Party menjadi Zimbabwe African Peoples Union (ZAPU). Pada tahun 1963 Mugabe mengundurkan diri dari keanggotaan ZAPU dan bergabung dengan pesaingnya yaitu Zimbabwe

African National Union (ZANU) yang dibentuk tahun pada 1963 oleh Ndabaningi Sithole, Edgar Tekere, Edson Zvobgo, Enos Nkala dan Herbert Chitepo. Dimana ideologi ZANU banyak dipengaruhi oleh “*Africans idea*” dari Pan Africanist Congress di Afrika Selatan (Glaude.Jr, 2002, hlm. 105) dan dipengaruhi pula oleh “*Maoism*” sedangkan ZAPU merupakan sekutu dari African National Congress dan merupakan pendukung ortodok yang cenderung pro Uni-Soviet dalam hal kemerdekaan nasional.

Semenjak bergabung dengan ZANU, nama Mugabe kian bersinar dan kian menonjol setelah dia diangkat sebagai Sekretaris Jenderal partai ZANU. Namun pada tahun 1964 Mugabe ditahan berkenaan dengan gerakan bawah tanahnya yang bertujuan untuk menggantikan kekuasaan Rhodesia (Zimbabwe) yang dipegang oleh golongan minoritas kulit putih. Dia dipenjara selama 11 tahun di penjara Salisbury (Harare). Pada tahun 1974, ketika masih di dalam penjara, atas masukan dari Edgar Tekere, Mugabe dipilih guna mengambil alih kepemimpinan ZANU setelah Ndabaningi Sithole tidak mampu memperoleh suara yang menyakinkan dalam pencalonannya sebagai ketua ZANU (Handanu, 2010, hlm. 30).

Setelah habis masa tahanannya Mugabe kemudian meninggalkan Rhodesia (Zimbabwe) pada tahun 1976 guna bergabung dengan gerakan pembebasan Zimbabwe yang berpusat di Mozambiq. Dimana diasumsikan secara sepihak Mugabe mengambil alih kepemimpinan ZANU setelah meninggalnya Herbert Chitepo pada 18 Maret 1975. Beberapa tahun kemudian, terjadi silang pendapat antara Mugabe dan Ndabaningi Sithole sehingga menyebabkan terjadinya perpecahan di dalam ZANU yang membagi ZANU menjadi dua golongan. Mugabe mendirikan ZANU tandingan yang cenderung bersifat militan dimana sebagian besar anggotanya berasal dari bangsa Shona, dan meninggalkan Sithole yang memimpin ZANU moderat yang sebagian besar anggotanya berasal dari bangsa Ndebele.

Dengan ditandatanganinya Perjanjian “Lancaster House” pada 21 Desember 1979 di London. Perjuangan bertahun-tahun yang terjadi sejak awal tahun 1970an antara dua Patriot Front, ZANU yang dipimpin Mugabe dan ZAPU yang dipimpin oleh Joshua Nkomo guna meraih kedaulatan

Rhodesia (Zimbabwe) dari pemerintahan kulit putih yang saat itu berada ditangan Ian Smith seakan mendapat jalan cerah setelah adanya golongan-golongan yang ikut mendukung tercapainya kedaulatan Zimbabwe di tangan bangsanya sendiri.

Seruan yang di kemukakan oleh B.J. Vorster terhadap Ian Smith, yang pada waktu itu merupakan kepala pemerintahan Rhodesia Selatan (Zimbabwe) yang menyatakan bahwa kekuasaan kaum minoritas kulit putih di Zimbabwe tidak dapat dipertahankan lagi. Diambang kehancuran kekuasaan Ian Smith, pada tanggal 3 Maret 1978 Abel Muzorewa, Ndabaningi Sithole mengadakan pertemuan dengan Gubernur Lodge di Salisbury (Harare), membicarakan sebuah kesepakatan guna memberikan kekuasaan sementara dan mengadakan pemilihan umum yang dilaksanakan pada bulan April 1979. Pemilihan umum tersebut dimenangkan oleh Bishop Abel Muzorewa bersama partai United African National Council, dan kemudian Abel Muzorewa menjadi perdana menteri pada 1 Juni 1979 dan mengubah nama Rhodesia Selatan dengan Zimbabwe Rhodesia.

Berdasarkan dalam pertemuan dari Commonwealth Heads of Government yang dilaksanakan di Lusaka pada tanggal 1-7 August 1979, pemerintah Inggris mengundang pula yang Abel Muzorewa, dan para pemimpin Patriotic Front yaitu Mugabe dan Joshua Nkomo dalam sebuah pembicaraan konstitusi yang diadakan di Lanchaster House. Dimana tujuan diadakannya konfrensi tersebut guna membicarakan kesepakatan konstitusi kemerdekaan Zimbabwe atas kekuasaan Inggris dan mengadakan pemilihan umum dimana dalam pelaksanaannya harus diawasi di bawah otoritas Inggris, demi pencapaian kemerdekaan Rhodesia Selatan (Zimbabwe) dan mengatasi perbedaan pandangan politik diantara para peserta pemilu.

Lord Carrington yang merupakan sekretaris Negara dari Inggris ditunjuk untuk memimpin jalannya konfrensi tersebut, dimana konfrensi tersebut dilaksanakan dari tanggal 10 September-15 Desember 1979. Dimana dihadiri oleh 67 delegasi yang terdiri dari 23 delegasi dari Inggris, 21 delegasi dari Patriotic Front, dan 23 delegasi dari Zimbabwe Rhodesia (Chung, 2006, hlm. 242). Termasuk didalamnya hadir pula Robert Mugabe.

Dalam konferensi tersebut didapat tiga kesepakatan awal isu pokok yang disetujui bersama yang terdiri dari :

- a. Ringkasan dari konstitusi kemerdekaan,
- b. Pengaturan-pengaturan untuk masa pemberian kemerdekaan, dan
- c. Persetujuan gencatan senjata yang ditandatangani kedua pihak yang bertikai.

Dan dalam kesepakatan akhir perjanjian ini dan penandatangannya, para peserta menyetujui kesepakatan sebagai berikut :

- a. Menerima otoritas dari seorang gubernur,
- b. Mentaati konstitusi kemerdekaan,
- c. Memenuhi kesepakatan pra kemerdekaan,
- d. Mentaati gencatan senjata,
- e. Berkampanye secara damai dan tanpa intimidasi,
- f. Meninggalkan penggunaan kekuatan atau kekerasan dalam pencapaian tujuan politik, dan
- g. Menerima semua hasil pemilihan umum, dan menginstuksikan semua golongan yang berada di bawah otoritasnya untuk melakukan hal yang sama.

Dalam konferensi tersebut juga disepakati, kesepakatan diadakannya pemilihan umum, yang telah disetujui akan diadakan pada bulan Februari 1980. Setelah disahkannya perjanjian Lanchaster House, Mugabe kemudian membuat dua buah keputusan yang penting, pertama Mugabe memberikan jatah 20% kursi bagi kaum kulit putih dalam parlemen, yang kedua Mugabe menyetujui penangguhan konstitusi amandemen selama sepuluh tahun. Mugabe kembali ke Zimbabwe pada Desember 1979, dimana sekembalinya di tanah air Mugabe disambut layaknya pahlawan.

Setelah kampanye yang diselenggarakan pada Februari 1980 yang dimenangkan oleh Mugabe, dimana Mugabe bersama ZANU memenangkan 50 kursi dari 80 kursi parlemen yang ada. Dan Mugabe diangkat sebagai Perdana Menteri pada 8 Maret 1980.

Dukungan politik Mugabe yang besar didapat dari Suku Shona, yaitu suku pribumi yang berada di daerah utara Zimbabwe. Upaya Mugabe

membangun Zimbabwe tidaklah mudah dikarenakan sulitnya berkoalisi dengan partai saingannya ZAPU yang didukung oleh Suku Ndebele yang berada di selatan Zimbabwe. Dikarenakan para pengikut ZAPU tidak mau menerima hasil pemilu tersebut dimana pemilu tersebut diklaim banyak kecurangan dan intimidasi.

Ketika perundingan di London untuk mencapai perdamaian di Zimbabwe, Mugabe menyatakan kekecewaannya karena perundingan itu menghalanginya untuk mencapai kemenangan mutlak, yang akan memberikan kesempatan untuk mendiktekan kehendaknya. Namun Mugabe terpaksa menyetujui untuk membentuk pemerintahan koalisi dengan saingannya Joshua Nkomo, pemimpin *Zimbabwe African People's Union* (ZAPU), sedangkan dua pasukan gerilya lain, Zanla dan Zipra diintegrasikan menjadi satu tentara nasional (Adnan, 2008. Hlm: 102).

4.2 Masa pemerintahan Robert Mugabe tahun 1980-1987

Menjadi sebuah negara yang baru merdeka bukan hal gampang. Robert Mugabe mengatur pemerintahan yang baru seumur jagung memerlukan usaha yang lebih. Belum stabilnya kondisi di berbagai bidang, mulai dari Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya. Masih banyak hal-hal yang harus diperhitungkan untuk menentukan suatu kebijakan. Karena suatu tindakan akan mempengaruhi bukan hanya yang menjadi fokus, bahkan ke berbagai bidang yang lainnya. Ditambah lagi keputusan-keputusan yang diambil harus dipertimbangkan matang-matang. Belum memiliki pengalaman sebagai perdana menteri, bukan berarti Robert Mugabe bisa dipandang sebelah mata. Beliau memiliki pengalaman dalam pergerakan kemerdekaan, maupun sebagai pemimpin partai. Mugabe bersama ZANU berhasil memenangkan Pemilu yang diadakan pada tahun 1980. Kemenangan pemilu tersebut menetapkan Mugabe menjadi seorang Perdana Menteri untuk masa jabatan 5 tahun kedepan. Kekuasaan Mugabe tidak hanya bertahan selama 5 tahun pertama, namun dapat berlanjut ke periode selanjutnya. Tahun 1985 Mugabe bersama ZANU memenangkan pemilu kembali, dengan memenangkan 67 dari 100 kursi perlemen. kemenangan tersebut membuka kesempatan Mugabe

guna melakukan perubahan konstitusi Zimbabwe, termasuk pemulihan kawasan yang rusak akibat perang saudara. Peperangan yang tidak kunjung berhenti, hingga akhirnya Mugabe dan Nkomo menyetujui persetujuan guna menggabungkan ZANU dan ZAPU menjadi ZANU-PF pada Desember 1987. Perubahan konstitusi yang dilakukan Mugabe pada tahun 1987 yang awalnya sistem parlementer menjadi sistem presidensial. Yang berlaku sejak 1 Januari 1988, menjadikan Mugabe sebagai presiden eksekutif pertama di Zimbabwe dengan Joshua Nkomo sebagai wakil presiden.

Selain dalam pemerintahan, Mugabe pun mengeluarkan kebijakan yang cukup kontroversial yaitu *Landreform*. Bertujuan untuk pemerataan kepemilikan lahan yang sangat timpang di Zimbabwe. Perseteruan antara ZANU dan ZAPU tidaklah kunjung berakhir hingga pada puncaknya timbul bentrok fisik diantara keduanya hingga memakan korban jiwa. Pada November 1980 terjadi apa yang disebut dengan pemberontakan “Entumbane” yang terjadi di Harare. Hingga memakan 300 korban jiwa. Dan kemudian terjadi pemberontakan yang kedua pada Februari 1981 yang terjadi di Glenville dan Connemara yang berada di daerah Midlands, dimana kedua pemberontakan tersebut dalam sejarah Zimbabwe lebih dikenal dengan Gukuruhundi yang mengakibatkan korban hingga mencapai 20.000 jiwa. Konflik yang berujung dengan kekerasan tersebut berakhir setelah ZANU dan ZAPU menyetujui penggabungan kedua partai pada 22 Desember 1987 menjadi ZANU-PF (Zimbabwe Africa National Union-Patriot Front) (Asuelime dan Simura, 2013, hlm. 56). Setelah terbentuknya ZANU-PF, Mugabe kemudian mengangkat Nkomo sebagai wakil presiden. Sebelumnya pada tahun 1987 Mugabe telah mengubah konstitusi pemerintahan Zimbabwe yang pada mulanya bersifat parlementer menjadi sistem presidensial, dan kemudian mengangkat dirinya sebagai presiden Zimbabwe yang kemudian berkuasa hampir tiga dekade.

4.2.1 Strategi Perdana Menteri Mugabe Mengatasi Permasalahan Dalam Negeri

Sebagai negara yang baru merdeka, masih banyak yang perlu dibenahi karena hasil dari peninggalan penjajah maupun proses kemerdekaan. Peninggalan-peninggalan tersebut ada yang berbentuk bangunan maupun tidak. Peninggalan-peninggalan yang bukan berbentuk bangunan pun terdapat diberbagai bidang, baik politik maupun sosial. Untuk mengatasi permasalahan dalam negeri, maka Robert Mugabe sebagai Perdana Menteri yang baru dilantik mengeluarkan beberapa keputusan yang diharapkan dapat mengatasi masalah yang timbul pada masa awal kemerdekaan. Namun penulis hanya akan menguraikan strategi yang menurut penulis sangat berpengaruh terhadap perkembangan Zimbabwe ke depannya.

4.2.1.1 Landreform

Semenjak kedatangannya diakhir 1880, penduduk kulit putih agar dapat mencukupi kebutuhan pangannya sehari-hari masih mengandalkan dari hasil pertanian petani pribumi. Pada masa tersebut para petani pribumi dapat dikatakan layak secara perekonomiannya bahkan beberapa petani pribumi ada yang mempunyai dan mengolah lahan seluas 150 hektar. (Bonarjee, 2013. hlm. 5) Hal tersebut menandakan bahwa penduduk kulit putih masih menjadi minoritas dalam bidang pertanian. Lahan-lahan yang dimiliki petani pribumi tentu lebih banyak ketimbang lahan-lahan yang dimiliki petani kulit putih, karena lahan yang dimiliki petani kulit putih belum dapat mencukupi kebutuhan sehari-seharinya.

More than a hundred years ago, in 1890, British force occupied a part of Southern Africa that is now known as Zimbabwe. A year earlier the white settlers had been given rights to the land of indigenous people. The British South Africa Company had been formed to buy concessions from the British Crown and this formed the basis of the subsequent land grabbing by the settlers. Over the next ten years or so, as the take-over of land unfolded, white settlers hemmed in the majority black population on what they called Native Reserves (known today as Communal areas) (Chitsike, 2003. hlm. 2).

Menurut Chitsike tersebut menjelaskan bahwa dalam proses pemindahan kepemilikan lahan yang awalnya milik penduduk pribumi menjadi milik penduduk kulit putih. Awalnya British South Africa Company (BSAC) harus mendapatkan konsesi dari kerajaan Inggris yang kemudian menjadi dasar hukum untuk pengurusan lahan yang ada di Zimbabwe tersebut. Setelah mendapatkan konsesi

tersebut dimulailah pemindahan-pemindahan kepemilikan lahan dari penduduk pribumi ke penduduk kulit putih. Lahan-lahan yang kemudian menjadi milik penduduk kulit putih merupakan lahan yang subur dan unggul, sedangkan lahan milik penduduk pribumi hanya tersisa lahan yang gersang dan kurang subur ditambah juga jumlah lahan yang dimiliki menyusut yang awalnya mayoritas menjadi minoritas. bahkan lahan-lahan penduduk pribumi dikelilingi oleh lahan penduduk kulit putih, lahan milik pribumi tersebut yang sekarang dikenal dengan sebutan komunal area.

Hal yang sama pun diungkapkan oleh Bonarjee bahwa “kondisi tersebut berubah ketika pada 1899 lebih dari 9 juta hektar dari lahan utama telah berpindah tangan ke perusahaan-perusahaan milik Inggris, kebanyakan bukan untuk pengolahan pertanian bahkan 6 juta hektarnya dimiliki oleh individu-individu penduduk kulit putih (2013. hlm. 5).

Kepemilikan lahan yang timpang antara penduduk kulit putih dengan penduduk pribumi berlangsung selama lebih dari setengah abad tersebut mengakibatkan penderitaan berkepanjangan. para penduduk pribumi harus tinggal di rumah yang dibangun di lahan sempit dan harus berdesak-desakan dengan penduduk pribumi lainnya. Hal ini diperparah lagi dengan lahan pertanian yang mereka miliki kebanyakan merupakan lahan yang tandus, bahkan walaupun dengan curah hujan yang normal, hasil panennya kurang mencukupi. Ditambah lagi dengan kurang menentunya curah hujan dan kekeringan yang berkepanjangan.

Kesewenang-wenangan yang terjadi di Zimbabwe bukan berarti berjalan mulus, melainkan terjadi perlawanan yang dilakukan oleh penduduk pribumi, seperti yang diungkapkan oleh Chitsike “*Conquest through land grab and livestock seizure brought stiff resistance from the indigenous people. The first major uprising soon exploded in 1893*” (2003. hlm. 2). perlawanan yang terjadi dapat diredam oleh BSAC dan para pemimpin perlawanan kemudian dieksekusi. Setelah meredamnya perlawanan yang dilakukan penduduk pribumi, dalam periode yang singkat sampai tahun 1914 banyak pemindahan lahan yang terjadi hingga mencapai proporsi kepemilikan lahan yang sangat tidak berimbang. Penduduk kulit putih yang hanya tiga

persen dari total penduduk saat itu namun menguasai 75 persen tanah yang ada dan merupakan tanah yang subur, sedangkan penduduk pribumi hanya memiliki sekitar 23 persen dan juga merupakan tanah yang buruk. Penduduk kulit putih hanya sekitar 28.000 sedangkan penduduk pribumi ada sekitar satu juta jiwa. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Chitsike “...up to 1914 the division of land became vastly disproportionate. Just three percent of the population controlled seventy-five percent of the land, while most of the rest were restricted to a mere twenty-three percent of the worst land in designated reserves” (2003. hlm. 2).

Kesengsaraan yang dialami oleh penduduk pribumi ini diperparah oleh diberlakukannya Undang-undang perbendaharaan tanah yang diterbitkan pada tahun 1930 yang kemudian menjadi dasar hukum untuk memindahkan lahan dan juga memberikan wewenang kepada penduduk kulit putih untuk mengolah lebih dari 50 persen dari total sumber daya alam produktif negara. Dan wilayah negara yang berada diwilayah paling kering paling tidak cocok untuk budidaya atau tempat tinggal manusia sekitar 30 persen, wilayah negara tersebut menjadi tempat tinggal penduduk pribumi. Dalam undang-undang tersebut juga melegitimasi pemindahan paksa penduduk asli 1,1 juta penduduk dari wilayah penduduk kulit putih ke area komunal dan juga meletakkan dasar-dasar yang dijadikan patokan untuk mengusir penduduk “liar” atau ilegal. Hal tersebut seperti yang diutarakan oleh Bonarjee (2013. hlm. 5).

Pendapat serupa disampaikan oleh Moyo dan Skalness:

“through the Land Apportionment Act of 1930 and the gradual and often forced removal of black ‘squatters’ from the ‘white’ areas. The position of white farmers was further bolstered by price discrimination against black peasants in the produce markets and various interventionist measures by the state. These policies combined to produce and maintain a ‘reserve’ of a cheap labour for employment in the mines, manufacturing business, farms and homes owned by the whites” (1990. hlm. 203).

dari kutipan tersebut menjelaskan bahwa undang-undang tersebut digunakan untuk mengusir para penduduk pribumi dari wilayah penduduk kulit putih seperti yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Dari kebijakan yang diterapkan tersebut membuat penduduk-penduduk pribumi yang tidak

memiliki lahan atau yang memiliki lahan yang sempit kemudian mereka bekerja sebagai buruh-buruh dengan upah yang minimum untuk bekerja di sektor pertambangan, peternakan, maupun sektor perekonomian lainnya. Buruh-buruh tersebut bekerja di tambang, bisnis manufaktur, peternakan dan rumah milik orang kulit putih.

Permasalahan yang muncul setelah adanya undang-undang perbendaharaan tanah tahun 1930 diamini pula oleh Bonarjee (2013. hlm. 6) bahwa undang-undang tersebut menghilangkan lahan pertanian dan usaha milik pribumi, hal tersebut membuat penduduk pribumi tidak memiliki pilihan lain selain bekerja sebagai buruh dengan upah murah dan bekerja kepada orang kulit putih. penduduk pribumi yang tinggal di area komunal sudah meningkat, sementara di daerah kulit putih 45 persen dari lahan benar-benar tidak dimanfaatkan. Sektor pertanian, industry, dan manufaktur yang dibuka oleh penduduk kulit putih hanya dapat menampung tidak lebih dari satu dari sepuluh penduduk pribumi yang ada. Hal yang terjadi itu membuat perekonomian yang terjadi di wilayah komunal area semakin merosot. Kemiskinan yang dialami oleh penduduk pribumi semakin parah.

Kondisi perekonomian yang kacau semakin diperparah oleh kegagalan-kegagalan pemerintahan Inggris di Zimbabwe dalam mensponsori berbagai proyek dalam sektor pertanian membuat produktivitas pertanian menurun dan meningkatkan jumlah pengangguran seperti mekanisme pertanian Zimbabwe, kondisi tersebut terjadi pada kisaran 1950 sampai 1960an. Seperti diungkapkan oleh Chisango dan Obi bahwa “...in the late 1950’s and early 1960’s emboldened the critics who easily attributed the decline in agricultural productivity and growing unemployment as witnessed in Zimbabwe to farm mechanization.” (2010. hlm. 7).

Kondisi Zimbabwe pada tahun 1960 diungkapkan oleh Chitsike, yaitu: “In the ensuing years various pieces of legislation were passed which sought to protect and strengthen the huge privately owned settler farms that were largely situated in high rainfall areas. The growing black population could hardly eke out a living on the generally poor soils in the communal areas. Discontent gradually took shape within the liberation movement which emerged as a major challenge to the status quo in the early 1960’s.” (2003. hlm. 2).

Pada 1960an banyak kebijakan-kebijakan yang dilegalkan atau diloloskan yang berusaha untuk melindungi wilayah-wilayah pertanian yang berada di wilayah yang memiliki intensitas hujan tinggi agar tetap dimiliki oleh para petani kulit putih. hal tersebut membuat penduduk pribumi terutama yang tinggal di komunal area hampir tidak dapat bertahan hidup dan semakin membuat masyarakat komunal terjerumus semakin dalam di lingkup kemiskinan. Kesewenangan ini yang kemudian menimbulkan gerakan-gerakan pemberontakan di berbagai daerah di Zimbabwe. Hal senada juga diungkapkan oleh Onslow (2011. hlm. 7) bahwa perjalanan politik Zimbabwe khususnya bagi tokoh-tokoh nasionalis terjadi dilatarbelakangi oleh kehidupan-kehidupan buruh yang belum layak dan hidup dibawah garis kemiskinan.

Setelah berbagai perjuangan yang diusung oleh para tokoh-tokoh nasional Zimbabwe, akhirnya dapat merdeka pada 18 April 1980. Robert Mugabe yang terpilih sebagai Perdana Menteri dan juga merupakan tokoh nasionalis yang ikut berjuang dan memperjuangkan hak-hak penduduk pribumi agar dapat menikmati kehidupan yang layak tanpa adanya perbedaan dengan penduduk kulit putih. Cita-cita yang selalu diperjuangkan ketika berupaya memperoleh kemerdekaan, ingin diterapkan oleh Robert Mugabe sebagai Perdana Menteri yang baru. Menurut Zikhali (2008. hlm. 1) bahwa:

“At independence in 1980, Zimbabwe inherited an agricultural sector characterized by duality and a racially skewed land ownership pattern. A modernized commercial large-scale farming sub-sector existed alongside a non-mechanized, traditional small-scale sub-sector. It is against this background that the government of Zimbabwe, since independence, has had to pursue a land reform and resettlement program premised primarily on the acquisition and redistribution of land.”

program *Landreform* atau distribusi lahan yang dilakukan oleh pemerintah Mugabe dan menjadi program awal tersebut dilatarbelakangi oleh kepemilikan lahan yang condong secara rasial dan mayoritas kepemilikan lahan dimiliki oleh penduduk kulit putih. sektor pertanian komersial yang berskala besar yang dimiliki oleh penduduk kulit putih, dan sektor pertanian tradisional kecil yang dimiliki oleh penduduk pribumi. Ketimpangan-

ketimpangan yang terjadi sebelum kemerdekaan, menjadi alasan pemerintah Mugabe untuk menjalankan program *Landreform* tersebut.

Pada awal terpilihnya Robert Mugabe menjadi perdana Menteri, hal yang ingin diubah oleh Mugabe adalah mengenai kepemilikan lahan yang dimonopoli oleh penduduk kulit putih. Mugabe ingin lahan-lahan yang dimiliki oleh penduduk kulit putih agar bisa berpindah tangan ke penduduk pribumi dan juga bisa mendongkrak penghasilan penduduk pribumi. Akhirnya meluncurkan program bernama *landreform* untuk dapat mewujudkan keinginannya tersebut.

“The seriousness of the issue of land reform is undeniable in a country where prior to 1980 a maximum number of 5.700 white farmers owned half the productive area and black peasants were relegated to mostly inferior land in the drier, drought-ridden parts of the country” (Moyo, 1990, hlm. 202).

Dalam kutipan tersebut dijelaskan bahwa permasalahan lahan pertanian yang ada di Zimbabwe adalah permasalahan yang serius. Dijelaskan pula bahwa dari seluruh lahan pertanian produktif yang ada, setengahnya dimiliki oleh petani kulit putih yang hanya berjumlah 5700 orang. Lahan yang dimiliki oleh petani kulit putih adalah tanah yang subur sedangkan petani pribumi hanya memiliki lahan pertanian yang memiliki kandungan air minim dan merupakan lahan yang sering dilanda kekeringan.

Program *Landreform* ini kemudian diluncurkan pada bulan September 1980 seperti yang diungkapkan oleh Chisango dan Obi (2010. hlm. 5) *“Driven by commitments made at the Lancaster House Agreement that reinforced faith in the crucial steering role of Britain, Zimbabwe launched its ambitious land resettlement programme in September 1980, a mere 5 months after political independence was granted to this former British Colony.”* Penerapan *Landreform* juga didorong oleh komitmen yang dibuat oleh *Lancaster House Agreement* agar memperkuat kepercayaan kepada pemerintah Inggris, dan juga sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah Inggris dan pemerintah Zimbabwe.

Menurut Chitsike (2003. hlm. 3) ada beberapa tujuan spesifik dari program *Landreform*, yaitu:

1. Untuk mengurangi kepadatan penduduk di komunal area
2. Untuk memperluas dan memperbaiki basis pertanian produktif di sektor pertanian, melalui petani individu ataupun kelompok petani
3. Untuk meningkatkan standar hidup penduduk pribumi yang miskin dan mayoritas di Zimbabwe
4. Untuk memperbaiki keadaan orang-orang yang telah terpengaruh oleh perang dan untuk merehabilitasi mereka
5. Untuk memberi kesempatan kepada orang-orang yang tidak memiliki tanah dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan kemudian digolongkan miskin
6. Untuk memberdayakan lahan yang terbengkalai dan kurang dimanfaatkan ke dalam produksi penuh sebagai satu aspek penerapan kebijakan redistribusi tanah yang adil
7. Untuk memperluas dan memperbaiki infrastruktur dan layanan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan produksi ekonomi

Pada awalnya, pemerintah menargetkan yang akan dicapai oleh proyek ini pada tahun 1980 adalah 18.000 untuk 1.5 Juta hektar tanah sampai 5 tahun (Chitsike, 2003. hlm. 4), hal tersebut dilakukan karena program tersebut masih baru dan butuh beberapa uji coba, sehingga target yang dicapai oleh pemerintah masih sedikit, setelah masa percobaan yang dilakukan pada tahun tersebut. Kemudian menurut Moyo dan Skalness (1990. hlm. 203) mengatakan “*However, since it was realized that the intensive resettlement programme would make little impact on the overall land hunger, the Transitional National Development Plan published in 1982 adopted a target of 162.000 families to be resettled by 1985*” yang maksudnya adalah rencana yang sebelumnya menargetkan hanya 18.000 untuk 1.5 juta hektar ingin ditingkatkan lagi agar pengaruh yang ditimbulkan lebih maksimal dan lebih terasa oleh penduduk.

Untuk meningkatkan dan juga mempercepat pemindahan kepemilikan lahan, maka target yang sebelumnya 18.000 untuk 1.5 juta ditingkatkan menjadi 162.000 keluarga untuk lahan pertanian sekitar 9 juta hektar, hal

tersebut dilakukan untuk meningkatkan perekonomian petani pribumi baik yang masih kecil ataupun menengah, seperti yang diungkapkan oleh Bonarjee:

“The first Transitional plan for Agriculture 1982-85 aimed to resettle 162.000 families on approximately 9 million hectares of land. Resettlement was intended to establish a small to medium scale indigenous farming sector” (2013, hlm. 8-9).

Program landreform untuk 3 tahun pertama atau dari tahun 1982-1985 diharapkan mampu untuk membagikan lahan sebanyak 9 juta hektar kepada 162.000 keluarga pribumi yang kurang mampu dan juga sebagai pemerataan kepemilikan lahan untuk pribumi. Hal tersebut juga bertujuan agar memperbaiki sektor pertanian skala kecil dan menengah.

Namun menurut Moyo dan Skalness:

“Already in August 1983 an announcement was made that new purchases of land would be frozen. By 1985, the year that the target of 162.000 resettled families was to have been achieved, only 35.000 had actually been given new land. The resettlement schemes at that time covered some 11 percent of the former white areas” (1990. hlm. 203).

bahwa dibulan agustus 1983 terdapat pemberitahuan yang berisi tentang pembelian tanah untuk penduduk pribumi akan dihentikan untuk sementara. Kemudian pada tahun 1985, target yang seharusnya dicapai yaitu 162.000 keluarga, hanya sekitar 35.000 yang telah diberi lahan baru. Skema tersebut hanya mencakup sekitar 11 persen wilayah bekas penduduk kulit putih.

Kegagalan target yang harus dicapai itu dipengaruhi oleh beberapa aspek. Mulai dari kerusakan yang terjadi yang kemudian diberi nama Gukurahundi, ada juga terhambatnya proses pemindahan kepemilikan lahan dari hubungan Zimbabwe dengan Inggris. Menurut Bonarjee (2013. hlm. 9)

“The pace of land acquisition was at its peak between 1980 and 1985 with about 430.000 hectares acquired each year. From 1985, new funding constraints imposed by the Thatcher government in 1984 slowed land reform down to a mere 75.000 hectares”.

Bahwa setiap tahun pemerintah berhasil membeli 430.000 hektar tanah milik penduduk kulit putih, namun jumlah lahan yang direlokasi tersebut menyusut menjadi 75.000 hektar dikarenakan pendanaan yang berkurang dari pemerintah Inggris.

Di akhir masa pemerintahan Mugabe sebagai perdana menteri terdapat tiga kesimpulan penting. Yang pertama, pada akhir 1987 ada 40.000 keluarga yang menempati 2,2 juta hektar lahan pertanian dengan dana yang digunakan mencapai 80 juta Poundsterling yang mana dana tersebut masih dibawah anggaran yang ditetapkan pemerintah Mugabe. Yang kedua, mayoritas penduduk mendapatkan keuntungan dari pembagian lahan tersebut, seperti mendapatkan peningkatan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan lebih, akses terhadap air bersih, kesehatan atau pun pendidikan. Mengingat sebagian besar keluarga yang mendapatkan lahan berasal dari populasi yang padat dan kekurangan. Maka laporan tersebut menyimpulkan bahwa program pemukiman kembali / *Landreform* memiliki dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan yang melanda penduduk pribumi Zimbabwe. Dan yang ketiga adalah adanya laporan bahwa tingkat pengembalian ekonomi pada program *Landreform* untuk ekonomi nasional adalah 21 persen.

4.2.1.2 Gukurahundi

Gukurahundi yang dalam bahasa Shona memiliki arti “hujan awal yang membasuh sekam sebelum datangnya musim semi” (Nyarota, 2006. hlm. 134). Merupakan sebuah operasi yang dilakukan oleh brigade kelima tentara nasional yang terjadi antara tahun 1983 dan 1987 yang bertugas untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi orang-orang yang anti terhadap pemerintah yang berada di komunitas Ndebele.

Menyusul Unilateral Declaration of Independence (UDI) oleh pemerintah kulit putih Rhodesia Selatan dari Kerajaan Inggris pada tahun 1965, gerakan nasionalis hitam, yang didukung oleh kekuatan komunis dan mereka sendiri banyak orang marxis-leninis, melancarkan kampanye militer untuk menggulingkan pemerintah Rhodesia Selatan dan membawa peraturan mayoritas ke negara tersebut (Wood. 2005, hlm. 175). kelompok nasionalis yang besar adalah Zimbabwe African National Union (ZANU) yang kebanyakan adalah suku Shona, didukung oleh orang-orang Tiongkok, dipengaruhi oleh Maoisme, dan Zimbabwe African People’s Union (ZAPU) yang sebagian besar adalah Ndebele, yang lebih Ortodoks dari Marxis-

Leninis dan didukung oleh Pakta Warsawa dan Negara-negara yang terkait. (Duignan, Gann. 1994, hlm. 35) Setiap kelompok nasionalis mempunyai tentara gerilya masing-masing, ZANU dengan ZANLA sementara ZAPU dengan ZIPRA. ZAPU dipimpin oleh Joshua Nkomo, seorang anggota serikat pekerja dari Bulawayo di Matabeleland, sementara ZANU dipimpin oleh seorang mantan guru dari Mashonaland, Robert Mugabe (Meredith. 2007, hlm. 22-23).

Kampanye nasionalis hitam dimulai dengan sungguh-sungguh pada bulan Desember 1972. Selama kampanye tersebut, ZANLA dan ZIPRA melawan pasukan keamanan Rhodesia Selatan dan juga secara teratur bentrok satu sama lain, meskipun organisasi induk mereka pada dasarnya bersekutu dari tahun 1976 sebagai Patriotic Front (Preston. 2004, hlm. 127-128). Perang tersebut berakhir pada bulan Desember 1979 dengan Lancaster House Agreement di London, yang kemudian Inggris mengambil alih kendali langsung negara tersebut untuk mengawasi pemilihan baru pada awal tahun 1980. Pemilihan ini dimenangkan oleh ZANU. Mugabe menjadi Perdana Menteri pertama Zimbabwe ketika Inggris memberikan kemerdekaan pada bulan April 1980. Nkomo diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri di pemerintahan baru (Kriger. 2003, hlm. 63).

Selama masa 1960 sampai kemerdekaan, dua partai yang bersaing yaitu Robert Mugabe dengan ZANU dan Joshua Nkomo dengan partai ZAPU. Kedua partai tersebut sama-sama berjuang melawan pemerintahan kulit putih yang dipimpin oleh Ian Smith. (Nelson. 1983, hlm. 244) partai ZANU kemudian menggunakan Gukurahundi sebagai strategi ideologis yang bertujuan untuk membawa perang ke ranah pemukiman sipil. Setelah Mugabe terpilih sebagai Perdana Menteri, pemerintahan Mugabe terancam oleh “para pembangkang”. Menurut *Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe* (1997, hlm. 11) Para pembangkang ini merupakan mantan gerilyawan dan simpatisan partai ZAPU yang tidak puas oleh terpilihnya Perdana Menteri tersebut.

Robert Mugabe yang saat itu menjadi Perdana Menteri telah menandatangani sebuah kesepakatan dengan Presiden Korea Utara Kim Il

Sung pada bulan Oktober 1980 untuk meminta militer Korea Utara melatih sebuah brigade untuk tentara Zimbabwe. Ini segera setelah Mugabe mengumumkan perlunya sebuah milisi untuk memerangi pemberontakan. Mugabe menjawab dengan mengatakan bahwa pembangkang harus waspada, mengumumkan bahwa brigade tersebut akan dinamakan “Gukurahundi” (Nyarota. 2006, hlm. 134). Brigade ini juga diberi nama Brigade Kelima diambil dari 3500 mantan tentara ZANLA di Tongogara Assembly Point, yang dinamai Josiah Tongogora, Jenderal ZANLA. Ada beberapa pasukan ZIPRA di unit ini untuk permulaannya, namun mereka ditarik sebelum akhir pelatihan. Pelatihan Brigade Kelima berlangsung sampai September 1982, saat Menteri Sekeramayi mengumumkan bahwa pelatihan telah selesai.

Panglima pertama Brigade Kelima adalah Kolonel Perence Shiri. Brigade Kelima berbeda dari semua unit tentara Zimbabwe lainnya yang langsung dibawah kantor Perdana Menteri, dan tidak terintegrasi dengan struktur komando tentara biasa. Kode, seragam, radio dan peralatan mereka tidak sesuai dengan unit tentara lainnya. Fitur mereka yang paling membedakan di lapangan adalah baret merah mereka (Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe, ed. 1997, hlm. 12).

Sebelum perang kemerdekaan, Partai ZAPU terbagi menjadi dua kelompok pada tahun 1963, kelompok yang terpisah tersebut menjadi ZANU yang dipimpin oleh Mugabe. Walaupun memiliki asal usul yang sama, namun dikemudian hari mereka tumbuh terpisah dan berbeda ideologi, ZANU merekrut anggotanya mayoritas berasal dari suku Shona, sementara ZAPU merekrut anggotanya mayoritas berasal dari suku Ndebele di daerah barat (Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe, ed. 1997, hlm. 10).

Pasukan kedua kelompok ini, tentara ZAPU (ZIPRA) dan tentara ZANU (ZANLA) sama-sama membela rakyat namun saling bertarung satu sama lain. Ketika Rhodesia Selatan berubah menjadi Zimbabwe pada 1980, dua tentara tersebut saling tidak percaya sehingga sulit untuk mengintegrasikan keduanya ke dalam tentara nasional. (Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe, ed. 1997, hlm. 11). Masalah ini hanya

terjadi di Provinsi Matabeleland. Tentara ZIPRA menyerang daerah sipil di Kadoma dan Bulawayo. Kekerasan yang terjadi tersebut kemudian menyebar luas ke wilayah-wilayah di sekitarnya. Peristiwa ini terjadi di bulan November 1980 dan semakin membesar di awal tahun 1981. Seorang Sejarawan Dr. Stuart Doran mengungkapkan melalui artikel yang diterbitkannya bahwa melalui dokumen-dokumen yang ditemukan menunjukkan bahwa pembunuhan yang terjadi bukan diprovokasi atau ditopang oleh pihak luar, melainkan kekejaman tersebut didorong oleh pimpinan ZANU dalam mengejar tujuan politik tertentu.

Pada bulan November 1980 Enos Nkala membuat sebuah pernyataan pada sebuah demonstrasi di Bulawayo, dimana dia memperingatkan kepada ZAPU bahwa ZANU akan memberikan beberapa tindakan terhadap mereka. Ini mendahului pecahnya pertengkaran pertama di Entumbane, dimana ZIPRA dan tentara nasional Zimbabwe bertempur dalam pertempuran selama dua hari (Stiff. 2000, 190).

Pada bulan Februari 1981, terjadi pemberontakan kedua yang menyebar ke Glenville dan Connemara di Provinsi Midland. Pasukan ZIPRA di bagian lain Matabeleland menuju Bulawayo untuk bergabung dalam pertempuran tersebut, unit tentara nasional Zimbabwe harus datang untuk menghentikan pertempuran tersebut. Pemerintah meminta Hakim Enoch Dumbutshena, mantan ketua Mahkamah Agung Zimbabwe untuk mengadakan penyelidikan atas pemberontakan tersebut. ZIPRA ditemukan sedang bersiap untuk perang. Banyak kader ZIPRA yang terdesak setelah peristiwa ini.

Dengan pengalihan kekuasaan politik, Tentara Rhodesian, ZANLA dan ZIPRA mulai bergabung untuk membentuk Tentara Nasional Zimbabwe. Personel ZANLA dan ZIPRA dicampur ke dalam batalyon baru, gerilyawan dipilih untuk pelatihan tugas. Setiap dari sekitar 34.000 gerilyawan dijanjikan sebuah tempat di tentara baru tersebut. Sementara itu mereka menunggu di masing-masing kamp ZANLA dan ZIPRA di seluruh negeri dengan gaji dan jatah yang sama dengan orang-orang kulit hitam di pasukan Rhodesia yang lama (Kriger. 2003, hlm. 68). Perpecahan mulai timbul antara ZANLA dan ZIPRA. Perpecahan sebagian berdasar suku, namun sebagian besar bersifat

politis, pemimpin ZIPRA mengeluh bahwa rekan-rekan mereka dari ZANLA tampaknya banyak mendapatkan promosi. Sementara ZANLA menduga ZIPRA merencanakan pemberontakan (Meredith. 2007, hlm. 60). Mugabe menuduh ZIPRA menolak mengakui kedaulatan pemerintah. Mugabe merasa perlu untuk mengamankan posisi ZANU, akhirnya Mugabe menandatangani kesepakatan rahasia dengan Korea Utara pada bulan Oktober 1980 yang isinya Korea Utara akan menyediakan instruktur dan peralatan untuk sebuah brigade elit yang akan menangani pembangkang politik dan melapor langsung ke Perdana Menteri (Meredith. 2007, hlm. 62).

Setelah Menteri Keuangan Enos Nkala mencerca Nkomo dan ZAPU pada sebuah demonstrasi politik Bulawayo pada bulan November 1980, dengan mengatakan bahwa mereka "menjadi musuh ZANU-PF", ZANLA dan veteran ZIPRA bentrok di dekat kota barat Entumbane selama dua hari (Meredith. 2007, hlm. 61). Ratusan orang tewas atau terluka sebelum Perdana Menteri mengirim beberapa unit Rhodes untuk campur tangan (Binda. 2007, hlm. 384). Insiden ini memperdalam rasa tidak percaya dan tidak senang yang merasuki negara dan batalyon terpadu Angkatan Darat Nasional (Meredith. 2007, hlm. 61). Prihatin dengan marginalisasi politik ZAPU, komandan ZIPRA di Matabeleland membangun kekuatan mereka. Lebih dari 6.000 tentara ZIPRA berkumpul di Tambang Sungai Gwaai, ke barat laut Bulawayo, dengan tank T-34 buatan Soviet, perwira personel lapis baja BTR-152 (pesawat tempur lapis baja) dan senjata anti-pesawat terbang; basis ZIPRA lain di Essexvale, ke tenggara, membentuk kelompok pertempuran lapis baja termasuk 10 T-34 (Binda. 2007, hlm. 385). Ketegangan meningkat lebih lanjut saat Mugabe memindahkan Nkomo dari Home Affairs pada tanggal 10 Januari 1981 dan menjadikannya menteri tanpa portofolio, di banyak tempat di Zimbabwe yang melihat penurunan pangkat (Meredith. 2007, hlm. 77). Menurut Brigadir Mike Shute, yang saat itu memimpin Brigade 1 Tentara Nasional Zimbabwe, kelompok gerilyawan ZANLA dan ZIPRA, yang secara teoritis berada di bawah komandonya, segera berada di tempat itu dan melakukan bentrokan terus-menerus dan pertempuran kecil

satu sama lain (Binda. 2007, hlm. 385). Banyak yang menjadi yakin bahwa perang sipil kedua sudah dekat.

Bentrokan gerilya tahun 1980, dikenal juga dengan nama Entumbane 1, terjadi di daerah Bulawayo, Zimbabwe antara 9 dan 10 November 1980, ditengah ketegangan politik dalam bulan-bulan awal kemerdekaan Zimbabwe (Binda. 2007, hlm. 383-384).

Pertarungan terjadi di pinggiran barat kota Entumbane di antara kelompok gerilyawan ZANLA dan yang lainnya dari ZIPRA, beberapa hari setelah dua faksi tersebut dimasukan ke dalam kamp dan menunggu untuk integrasi ke dalam tentara nasional Zimbabwe yang baru (Binda. 2007, hlm. 384).

Sebuah baku tembak empat jam, yang diendapkan oleh sebuah pidato oleh menteri pemerintah Enos Nkala yang mengancam bahwa ZANLA pada akhirnya akan menghancurkan ZIPRA, berakhir ketika unit dukungan BSAP berjumlah lebih dari 280 orang dari Echo Troop, Juliet Troop, Hotel Troop, Charlie Troop, dan Lima Troop (mereka adalah pasukan Zimbabwe yang terbagi pada barak-barak) (Hill. 2003, hlm. 76).

Angka resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah menghitung ada 53 tewas terdiri dari 15 pembangkang dan 43 warga sipil, dan lebih dari 500 orang luka, namun saksi mata menggambarkan jumlah korban tewas yang mencapai ratusan orang (Binda. 2007, hlm. 384). Konflik tersebut diikuti empat bulan kemudian oleh pemberontakan Entumbane tahun 1981 yang lebih besar, yang juga dikenal sebagai Entumbane II, yang hampir berkembang menjadi perang sipil (Kriger. 2003, hlm. 77).

Keadaan ini menjadi semakin parah setelah ditemukannya bom dan senjata pada bulan Februari 1982. ZANU secara terbuka menuduh ZAPU merencanakan perang dan pemimpin ZAPU ditangkap atau dikeluarkan dari kabinet. Namun pengadilan pengkhianatan tahun 1982 melibatkan Dumiso Dabengwa, Lookout Masuku dan empat lainnya gagal membuktikan sebuah kasus terhadap mereka. Semua dibebaskan meski Dabengwa dan Masuku ditahan kembali tanpa diadili selama empat tahun. Mungkin ribuan kader ZIPRA mundur dari tentara setelah peristiwa ini. Mereka melakukan tindakan

tersebut agar dapat tetap bertahan hidup. Dengan ditangkap dan diasingkannya para pemimpin mereka. Mereka merasa tidak ada yang bisa melindungi mereka di dalam tentara. “kami merasa diancam, itulah sebabnya kami memutuskan untuk pergi”, kata seorang pembangkang (Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe, ed. 1997, hlm. 15).

Pada tanggal 8 Februari, kader ZANLA di Barak Connemara di Gwelo mengejutkan rekan-rekan ZIPRA mereka, membunuh lebih dari 60 orang dan memaksa sisanya untuk melarikan diri ke semak-semak. Ketika bagian ZIPRA dari Batalyon Infanteri ke-13, yang berbasis di Glenville Camp dekat Entumbane, mengetahui hal ini di kemudian hari, ia menunggu sampai instrukturnya dari Angkatan Darat Inggris pergi pada malam hari, kemudian menyerang rekan-rekan ZANLA mereka, membunuh 12 di antaranya dan hamburkan sisanya Dibebankan dengan pesanan pemulihan, McKenna mengirim mobil lapis baja milik Devine dan D Company, 1RAR, yang diperintahkan oleh Letnan Amerika Dave Hill, ke Glenville. Sesampainya di malam hari, Elands melaju ke perkemahan dan meratakan tenda ZIPRA, membunuh banyak penghuni dan membersihkan jalan bagi pasukan Hill. Secara mengejutkan, pasukan ZIPRA memasang sedikit perlawanan; 40 orang tewas dan banyak lagi ditangkap, termasuk dua petugas, Kapten Mpfu dan Dlamini. (Binda. 2007, hlm. 385) Pada pagi hari tanggal 9 Februari, instruktur Inggris bingung untuk menemukan separuh ZANLA dari unit mereka hilang, dan orang-orang ZIPRA yang tersisa berjongkok di baris dalam penahanan 1RAR. "Apa yang terjadi?" tanya sersan Inggris itu. "Saya khawatir saat Anda pergi, batalyon Anda berantakan," jawab McKenna (Stiff. 2000, hlm. 80).

Personel ZIPRA di Bulawayo menggunakan kendaraan sipil untuk menyelundupkan senjata dan peralatan, termasuk mortir, ke kamp Entumbane mereka selama beberapa hari ke depan. C Company, 1RAR, yang terdiri dari 96 orang di bawah Mayor Lionel Dyck (termasuk sebuah Detasemen dari Perusahaan Pendukung) dan delapan kendaraan lapis baja, melihat ini saat mereka menghabiskan Alamo pada tanggal 11 Februari. Mayor tersebut melaporkan ke markas Brigade bahwa jumlah pasukan ZIPRA di Entumbane

tampaknya telah membengkak jauh, dan bahwa pagar rantai di sekitar kamp telah diturunkan. Atasan memerintahkannya untuk tidak turun tangan. Mengantisipasi serangan yang akan segera terjadi, Dyck menggunakan senapan yang diam untuk menembak lampu sorot di sekitar Alamo, mengantarkan kendaraannya ke dinding di sekitarnya sehingga anak buahnya dapat berdiri di atas mereka saat membela, dan menemukan mortir di berbagai target di kompleks ZIPRA (Binda. 2007, hlm. 386).

Di jalan, dua BTR-152 ZIPRA dari Essexvale maju menuju Bulawayo, menembaki tanpa pandang bulu ke segala arah, dan terlihat oleh Devine sekitar pukul 01:30. Elands menunggu di kegelapan sampai kendaraan ZIPRA berjarak sekitar 200 meter (660 kaki), lalu dipecat. Kedua APC langsung terkena dan sebagian besar pria di dalamnya terbunuh; korban selamat berlari sampai malam. Fleetwood kemudian tiba di kepala peleton 1RAR untuk mendukung Devine dan Husher. Pada waktu yang sama, orang-orang dari A Company, 1RAR menangkap seorang komandan ZIPRA yang mencoba memasuki Bulawayo melalui sebuah jalan belakang di gerobak Peugeot, dan 3 Peleton, A Company menangkap enam petugas ZIPRA yang berkendara ke kota di Jalan Essexvale dalam sebuah Toyota Land Cruiser. McKenna memerintahkan Hill dan D Company untuk membantu Dyck dengan mengambil posisi antara kota dan Entumbane. Sekelompok ZIPRA tidak berhasil menyerang Perusahaan D saat bergerak ke barat ke dataran tinggi di Lurkers's Ridge, tepat di sebelah tenggara Alamo. B Company, sementara itu, mengambil posisi di jalur kereta api di timur laut Lurkers's Ridge. McKenna mengatakan kepada Dyck melalui radio bahwa bala bantuan akan datang dan untuk "bertahan di sana" (Binda. 2007, hlm. 387).

Menjelang pukul 05:00, pasokan amunisi Dyck hampir habis, dan penyerang ZIPRA telah memukul Alamo beberapa kali dengan api RPG. Tidak ada orang yang terbunuh oleh roket-roket ini, tapi ketika anjing Dyck terluka, mayor tersebut marah dan memerintahkan anak buahnya untuk menuangkan tembakan senapan mesin yang lebih agresif pada pejuang ZIPRA yang maju. Dia meminta dukungan udara dari Markas Besar Brigade dalam bentuk bomber Lynx. Angkatan udara menolak permintaan tersebut,

namun Letnan Penerbangan Colin James tetap bertahan di Lynx yang dipersenjatai dengan senapan mesin FN MAG dan roket SNEB. Para kader ZIPRA memusatkan sejumlah besar tembakan ke pesawat James, dan memukulnya beberapa kali, namun gagal menembak jatuh; pilot memasang sejumlah serangan darat sebelum kembali ke markas. Kemudian dia melaporkan bahwa sebuah peluru menembus lantai kokpitnya dan menabrak helmnya. Petugas dan pria 1RAR mengekspresikan kekaguman besar akan keberanian James dalam serangan udara ini, namun atasan angkatan udaranya sangat marah karena dia telah memasuki wilayah operasi melawan perintah.

Ratusan orang tewas dalam pemberontakan tersebut. Hitungan resmi yang dirilis pada saat itu adalah 260, namun sejarawan menempatkan jumlah yang lebih tinggi; Martin Meredith mencatat "lebih dari 300" tewas, (Meredith. 2002, hlm. 62) sementara Alexandre Binda menulis bahwa unit Tentara Nasional Zimbabwe sendiri telah membunuh lebih dari 400 gerilyawan (Binda. 2007, hlm. 389). Dalam sejarahnya di Afrika Afrika Rifles, Binda menggambarkan Entumbane sebagai kemenangan terbesar resimen, berkomentar bahwa hal itu dimenangkan "dengan semangat profesionalisme, disiplin dan tekad" dalam menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar secara numerik (Binda. 2007, hlm. 385). Mayor Michael P Stewart dari Angkatan Darat Amerika Serikat menulis bahwa tindakan 1RAR di Entumbane "menyelamatkan pemerintah Mugabe dari perang saudara tertentu", dan memberikan "pukulan terakhir bagi kemungkinan militer ZIPRA" (Stewart. 2012, hlm. 103). Sejumlah analis mengomentari ironi bahwa Mugabe dan ZANU-PF, yang telah bertahun-tahun melawan pemerintahan putih dan pasukan Rhodesian selama tahun 1970an, diamankan dalam kekuasaan hampir setahun setelah berakhirnya Perang Bush oleh mantan tentara Rhodesian di bawah komando putih (Binda. 2007, hlm. 385). Binda juga menyoroti ironi bahwa jam terbaik RAR (dalam pandangannya) datang saat memperjuangkan Mugabe. Mugabe mengatakan bahwa gerilyawan ZIPRA yang tidak disiplin telah menghasut pemberontakan; dia menyebut mereka "hooligan bersenjata dan ketidakberdayaan bersenjata yang tidak loyal, salah arah dan bermotif politik" dan mengatakan bahwa menurut

informasi di depannya tujuan akhirnya adalah menggulingkan pemerintahannya (Kriger. 2003, hlm. 79). Dia mengatakan kepada parlemen bahwa telah ada "pola terorganisir yang pasti" di antara kelompok-kelompok ZIPRA yang memberontak. Komandan ZIPRA setempat mengklaim ZANLA telah memulai pertempuran, sementara Nkomo dan walikota Bulawayo menyalahkan pidato peradangan Nkala dan pernyataan serupa dari politisi ZANU-PF lainnya (Kriger. 2003, hlm. 79). Sebulan setelah pemberontakan, ZANU-PF membentuk sebuah komisi yang bertugas menyelidiki "gangguan pemberontakan" di Entumbane dan di batalyon terpadu di Ntabazinduna, Glenville dan Connemara. Badan ini melaporkan ke Mugabe pada bulan Juni 1981, namun temuannya tidak dipublikasikan. Menurut sejarawan Norma Kriger, ia menyalahkan ZANU-PF dan ZAPU dan karena itu "tidak memenuhi harapan pemerintah" (Kriger. 2003, hlm. 79). Abiodun Alao dari King's College London menandai episode Entumbane sebagai dimulainya dialogisasi Tentara Nasional Zimbabwe. Antusiasme dan kesuksesan mantan Rhodesian selama pertempuran, ditambah dengan kesiapan Mugabe untuk menyebarkannya, meyakinkan banyak orang di ZAPU bahwa ZANU-PF dan masyarakat kulit putih telah bersatu melawan mereka, (Alao. 2012, hlm. 50) dan mengintensifkan oposisi ZAPU terhadap pemerintah. Gerilyawan ZIPRA meninggalkan markas perakitan dan Tentara Nasional secara massal setelah pemberontakan tersebut gagal, karena takut akan keselamatan mereka. Rasa tekad Mugabe mengenai saingan politiknya sangat diperkuat, sementara itu; Entumbane memuaskannya bahwa perwira militer putih dan awak pesawat dapat dihitung dalam konflik masa depan dengan ZAPU. Keterlibatan Entumbane adalah yang terakhir RAR-Company dialokasikan ke unit Brigade 1 lainnya pada tahun 1981 selama proses reformasi militer - namun sejumlah perwira kulit putihnya kemudian memimpin unit pasukan khusus Zimbabwe selama tahun 1980an. Dyck, misalnya, menuju Batalyon Parasut 1 (Alao. 2012, hlm. 87).

Pemerintahan Mugabe segera memutuskan untuk mengurangi ukuran tentara masa depan sekitar 30.000 dan melucuti senjata dan mendemobilisasikan semua personil ZANLA dan ZIPRA yang belum

diintegrasikan, sehingga melanggar janji sebuah tempat di tentara untuk setiap gerilya (Kriger. 2003, hlm. 69). Setelah komandan ZIPRA Dumiso Dabengwa menolak memberikan perintah pelucutan senjata di Entumbane, Nkomo mengawasi sebuah parade di kamp tersebut dan memberikan perintah untuk melucuti seninya, melakukannya demi perdamaian ", dengan kata-kata Kriger, terlepas dari penolakannya terhadap gagasan tersebut (Kriger. 2003, hlm. 78). Mugabe mengumumkan kesepakatannya dengan Korea Utara pada Agustus 1981, dan 106 instruktur Korea Utara tiba di bulan yang sama. Nkomo menuduh Perdana Menteri menciptakan "tentara partisan khusus yang bercerai dari tentara nasional" untuk "kemungkinan pengenaan sebuah negara satu partai". Pada bulan Februari 1982, Mugabe mengumumkan bahwa tembikar senjata besar telah ditemukan di properti milik ZAPU dan ini adalah bukti adanya kudeta ZAPU yang direncanakan. Dia menyamakan kehadiran Nkomo di pemerintahan dengan "kobra di dalam rumah" dan segera memecatnya, yang secara bersamaan menangkap pemimpin ZIPRA dan merebut properti ZAPU (Meredith. 2007, hlm. 63-64).

Gambar 4.2

Tentara membawa bendera *Brigade Gukurahundi*



(Sumber: Stiff. 2000, hlm. 80)

Pada gambar 4.2 terlihat seorang tentara sedang memamerkan bendera *Brigade Gukurahundi*. Hal tersebut dilakukan pada saat parade militer setelah pelatihan selesai. Unit yang baru dilatih Korea Utara, dijuluki 5 Brigade,

selesai pada bulan Desember 1982, dan dikirim oleh Mugabe ke Matabeleland, yang tinggal selama lima tahun ke depan. Dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Gukurahundi, ia melakukan sejumlah pembantaian brutal dan kekejaman terhadap warga sipil di Matabeleland yang dituduh mendukung "pembangkang", yang jauh melebihi apa yang telah terjadi selama Perang Dunia Kedua. Perkiraan jumlah kematian berkisar antara 10.000 sampai 30.000 (Hill. 2003, hlm. 77).

Sebagian besar korban tewas akibat ditembak dalam eksekusi publik, seringkali setelah dipaksa menggali kuburan mereka sendiri di depan keluarga dan sesama penduduk desa. Jumlah kematian terbesar dalam satu pembunuhan terjadi pada tanggal 5 Maret 1983, ketika 62 pria dan wanita muda ditembak di tepi sungai Cewale, Lupane. Tujuh orang selamat dari luka tembak, yang lainnya meninggal. Cara lain yang dilakukan oleh Brigade Kelima yaitu dengan mengeksekusinya dalam jumlah besar kemudian membakar mereka dalam keadaan hidup-hidup di dalam gubuk. Mereka melakukan ini di Tsholotsho dan juga di Lupane. Mereka secara rutin akan mengumpulkan puluhan, atau bahkan ratusan warga sipil dan kemudian membawa mereka ke pusat desa seperti sekolah atau tambang. Disana mereka dipaksa menyanyikan lagu Shona yang isinya memuji ZANU, sekaligus dipukuli dengan tongkat. Pertemuan ini biasanya berakhir dengan eksekusi publik. Para korban yang terbunuh itu bisa jadi mantan ZIPRA, pejabat ZAPU, atau siapa saja yang dipilih secara acak. Pemerintah Zimbabwe menolak tuduhan ini dan balik menuduh pers asing yang bermusuhan dengan mengarang cerita. Pemerintah mencirikan tuduhan semacam itu sebagai propaganda yang tidak bertanggung jawab dan dibuat karena gagal memberikan bobot yang tepat atas kekerasan oleh pembangkang (Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe, ed. 1997, hlm. 15).

Gambar 4.3

Kuburan massal dari korban Gukurahundi



(sumber: Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe, ed. 1997, hlm. 28)

Pada gambar 4.3 terlihat lubang berisi tulang-belulang manusia yang ditemukan. Para korban biasanya dipaksa untuk membuat lubang-lubang tersebut hingga ukurannya sesuai keinginan para tentara. Setelah lubang selesai dibuat, kemudian para korban dibunuh oleh para tentara Brigade Kelima. Jasad-jasad korban dimasukkan kedalam lubang-lubang yang telah digali dan menjadi kuburan bagi para korban.

Pada bulan Januari 1983, sebuah tindakan keras dilakukan oleh brigade kelima di Matabeleland Utara yang bertujuan untuk membersihkan para pembangkang. Hal tersebut memfokuskan kepada pencarian tentara ZIPRA yang merupakan sayap kanan dari partai ZAPU. (Kuperman. 2015, hlm. 168–169) Penyitaan dan penahanan yang dilakukan sewenang-wenang oleh Brigade kelima, misalnya orang-orang Ndebele yang ikut berperang ketika kemerdekaan dianggap sebagai pembangkang dan bersalah karena melakukan kegiatan subversif (Werbner. 1991, hlm. 170). Dan sebagian besar yang ditangkap segera dieksekusi atau dibawa ke kamp dan mendapatkan pendidikan ulang. (Stiff. 2000, hlm. 197) kadang-kadang, Brigade Kelima juga membantai kelompok besar Ndebele secara acak, insiden tersebut terjadi pada bulan Maret 1983, ketika 55 warga sipil ditembak di tepi sungai cewale, di daerah Matabeleland utara (Cawthorne. 2009, hlm. 34–35).

Para pembangkang tersebut menargetkan pejabat ZANU. Diperkirakan 700-800 orang dibunuh oleh gerombolan di daerah pedesaan. Pada bulan

Agustus 1985, pembangkang membantai 22 warga Shona di Mwenezi. Di sebuah peternakan di Matobo, pembangkang membantai 16 orang (Makambe. 1995, hlm. 24).

Komisi Katolik untuk keadilan dan perdamaian di Zimbabwe mencatat setidaknya 3.750 pembunuhan dan angka pasti dari pembunuhan tersebut dapat lebih dari itu. Korban-korban tersebut berasal dari distrik Tsholotsho yang berada di Matabeleland Utara dan dari distrik Matobo yang berada di Matabeleland Selatan (Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe, ed. 1997, hlm. 8.). Sedangkan menurut penduduk lokal Ndebele korban berkisar antara 20.000 dan 30.000. pendapat lain diutarakan oleh Heidi Holland menuturkan bahwa yang meninggal diperkirakan mencapai 8.000. Pada Februari 1983, palang merah Internasional memperkirakan 1.200 Ndebele terbunuh pada bulan tersebut (Stiff. 2000, 220). Dalam resolusi yang diadopsi dengan suara bulat pada tahun 2005, asosiasi internasional yang berisi ahli tentang genosida (IAGS) memperkirakan korban tewas mencapai 20.000. Menteri keamanan nasional Zimbabwe Sydney Sekeramayi membantah bahwa tuduhan kekejaman tersebut adalah bagian dari program disinformasi ZAPU untuk mendiskreditkan tentara. Pada tahun 1992 Moven Mahachi yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus sebagai pejabat di partai ZANU yang pertama kali secara terbuka meminta maaf atas eksekusi dan penyiksaan warga sipil oleh Operasi Gukurahundi. Lima tahun kemudian, Enos Nkala yang merupakan mantan Menteri Pertahanan, menggambarkan keterlibatannya di operasi Gukurahundi sebagai “Neraka Abadi” dan menyalahkan Robert Mugabe karena telah mengaturnya. Di upacara pemakaman Joshua Nkomo pada tanggal 2 Juli 2000, Mugabe mengakui bahwa ribuan nyawa yang hilang dalam operasi tersebut dan menyebutnya sebagai “Tindakan yang Gila” (Stiff. 2000, 228).

Kampanye tersebut secara resmi berakhir pada bulan Desember 1987 ketika Mugabe dan Nkomo menandatangani sebuah kesepakatan persatuan yang menggabungkan ZAPU ke ZANU-PF dengan tujuan lain dari negara satu partai (Meredith. 2007, hlm. 73).

Robert Mugabe dan Pemimpin ZAPU Joshua Nkomo menandatangani perjanjian pada tanggal 22 Desember 1987. Ini secara efektif meleburkan ZAPU dan ZANU, berganti menjadi Zimbabwean African National Union – Patriotic Front (ZANU-PF). Kemudian pada tanggal 18 April 1988, Mugabe mengumumkan amnesti untuk semua pembangkang, dan Nkomo meminta mereka untuk meletakkan senjata mereka. Suatu peraturan umum dikeluarkan dengan mengatakan bahwa semua orang yang menyerah sebelum 31 Mei akan mendapat pengampunan penuh. Ini diperpanjang tidak hanya untuk para pembangkang tapi juga penjahat dari berbagai jenis hukuman penjara. Selama beberapa minggu berikutnya, 122 pembangkang menyerah.

Pada bulan Juni amnesti diperluas untuk mencakup semua anggota pasukan keamanan yang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Pada 1990an gangguan akhirnya berakhir. Hal ini membawa kelegaan di seluruh negeri, namun di beberapa bagian negara ini telah meninggalkan banyak masalah yang masih belum terpecahkan sampai saat ini. Ini termasuk masalah kesehatan, kemiskinan, praktis, dan hukum yang buruk, dan kecurigaan pejabat yang mengakar.

4.2.2 Strategi Perdana Menteri Mugabe Mengatasi Permasalahan Luar Negeri

Sebagai negara yang baru merdeka, pengakuan dari negara lain sangatlah penting. Terutama dari negara yang sempat menguasai Zimbabwe, yaitu Inggris. Bagi Inggris terdapat ketakutan bahwa para penduduk kulit putih akan mendapatkan perlakuan diskriminatif. Khususnya terhadap lawan-lawan politik dari Mugabe yang berasal dari orang kulit putih. Setelah Mugabe menjabat sebagai perdana menteri, beliau memilih para menteri yang akan membantu tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Mugabe bukan hanya memilih menteri yang berasal dari partainya ataupun memiliki kesamaan pandangan politik yang sama dengan dirinya, melainkan memilih juga yang berasal dari lawan-lawan politiknya. “Malah ia menunjuk kepala intelejen Ken Flower, yang pernah melakukan makar / percobaan atas pembunuhan Mugabe. Bukan hanya itu. Mugabe bahkan memelihara hubungan baik

dengan mantan pemimpin Rhodesia Selatan, Ian Smith” (Adnan, 2008. hlm: 100). Hal tersebut dilakukan oleh Mugabe agar dapat meredam situasi politik yang memanas karena pemilihan umum yang dimenangkan oleh partai Zanu-PF.

Langkah yang dilakukan Mugabe mendapatkan apresiasi dari kawan maupun lawan politiknya, dan diharapkan mampu meredam konflik-konflik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan yang baru berjalan tersebut. Namun bukan hanya lawan politiknya yang berasal dari politikus berkulit putih, terdapat pula lawan politik yang pada awalnya bergerak bersama dengan Robert Mugabe, namun berseberangan setelah kemerdekaan, dan yang paling besar adalah Zapu, yang dipimpin oleh Joshua Nkomo. Mugabe menjadikan Joshua Nkomo sebagai *Minister of Home Affair*.

Pengangkatan lawan-lawan politik Mugabe kedalam pemerintahan Zimbabwe. Mempunyai tujuan khusus, salah satunya agar menjaga hubungan baik dengan Inggris. Ketika Rhodesia Selatan (Zimbabwe) dikuasai oleh pemimpin kulit putih yaitu Ian Smith, beliau memutuskan hubungan dengan Inggris. Hal tersebut ingin diubah oleh Mugabe ketika Zimbabwe berhasil merdeka. Itikad baik tersebut diapresiasi oleh Inggris. Bahkan Inggris memberikan bantuan kepada Mugabe untuk dapat memulai program *Landreform*. Bantuan dana tersebut untuk 18.000 keluarga dengan tanah seluas 2,5 juta hektar bekas tanah kulit putih yang ditinggalkan selama perang. Program tersebut perlu disertai pembuatan infrastruktur seperti jalan raya, sekolah, perumahan dan klinik kesehatan (Adnan. 2008, 101).

Pada awal kepemimpinannya pemerintahan Zimbabwe memprioritaskan guna meningkatkan sumber daya manusia dan pengembangan sector pertanian. Pinjaman dana sebesar \$15 juta yang berasal dari Presiden Nigeria Shehu Shagarani, yang kemudian digunakan untuk melatih para Zimbabwean dan ekspatriat di Nigeria. Dan sisa dana yang ada digunakan untuk membeli perusahaan surat kabar yang dimiliki oleh perusahaan Afrika Selatan yang ada di Zimbabwe, hal ini dilakukan sebagai kontrol pemerintah terhadap mas media. Dan sisanya diperuntukkan guna memberikan pelatihan-pelatihan terhadap pelajar di *Nigerian Universities*,

pegawai negeri di *Administrative Staff College of Nigeria di Badagry*, dan pelatihan tentara di Nigerian Defense Academy di Kaduna (Handanu, 2010, hlm. 30).

4.3 Masa pemerintahan Robert Mugabe tahun 1987-2008

Setelah perubahan sistem pemerintahan yang dibarengi dengan penggabungan dua partai besar di Zimbabwe menjadi partai ZANU-PF. Penggabungan dua partai tersebut terjadi pada tanggal 22 Desember 1987. Pada tahun 1987 pula terjadi perubahan yang sangat mendasar, yaitu perubahan dalam sistem pemerintahan. Seperti yang diungkapkan oleh Asuelime dan Simura :

It can be argued that the major sustaining factor for Mugabe to stay in power for more than three decades was the constitutional amendment number 7 of 1987. The amendment transformed Zimbabwe from a parliamentary democracy to a presidential democracy (2013, hlm. 56).

Dari penjelasan tersebut dapat dijabarkan bahwa pada tahun 1987 terjadi perubahan dari sistem pemerintahan yang mulanya parlementer menjadi presidensial. Perubahan sistem pemerintahan tersebut termaktub dalam UU amandemen no. 07 tahun 1987. Perubahan sistem pemerintahan ini yang mungkin mempengaruhi masa pemerintahan Mugabe hingga dapat bertahan sampai lebih dari 30 dekade. Dalam amandemen tersebut tidak ada batas waktu untuk mencalonkan diri menjadi presiden. Sehingga hal tersebut membuat Robert Mugabe dapat menjadi Presiden untuk waktu yang lama. Bahkan peraturan di dalam partai ZANU-PF terdapat hal yang serupa. Tidak ada batasan waktu untuk menjadi presidium partai. Sehingga baik UU di negara Zimbabwe maupun peraturan di partai memperbolehkan Robert Mugabe menjabat sebagai Presidium Partai dan di waktu yang sama menjabat pula sebagai Presiden Zimbabwe. Setelah pergantian sistem pemerintahan tidak membuat permasalahan yang dihadapi oleh Zimbabwe hilang seketika. Berbagai permasalahan yang sebelumnya terjadi tetap berlanjut ketika Mugabe menjadi seorang presiden. permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika Robert Mugabe menjadi Perdana Menteri belum sepenuhnya selesai. Permasalahan-permasalahan tersebut masih harus dihadapi oleh Mugabe

ketika beliau menjadi Presiden. Selain menghadapi permasalahan yang sudah ada dari masa sebelumnya, Presiden Mugabe juga harus dihadapkan dengan permasalahan yang baru.

4.3.1 Strategi Presiden Mugabe Mengatasi Permasalahan Dalam Negeri

Selama Robert Mugabe menjabat sebagai Presiden Zimbabwe, tentu saja mengalami berbagai kendala maupun peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi stabilitas negara. Namun penulis hanya akan mengkaji beberapa permasalahan yang menurut penulis penting untuk dikaji dan mempengaruhi kondisi negara. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat menimbulkan permasalahan baru apabila tidak diatasi dengan tepat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Mugabe menggunakan strategi sebagai berikut:

4.3.1.1 Landreform

Setelah Robert Mugabe menjadi Presiden, Beliau tetap melaksanakan program *Landreform*. Karena program tersebut belum dapat memenuhi target yang diinginkan pemerintah, sehingga program tersebut berlanjut. Keberlanjutan dari program ini diharapkan mampu untuk mendongkrak pertanian petani pribumi dan juga dapat membantu meningkatkan perekonomian petani tersebut.

Landreform yang berlangsung sejak pergantian sistem pemerintahan sudah menampilkan perkembangannya. “*Up to May 1989 approximately 48.000 families had been resettled and a further 4.000 families had been allocated stands which they had yet to wake up.*” (Chitsike. 2003, hlm. 5). seperti yang diungkapkan tersebut bahwa perkembangannya sudah terasa oleh para penduduk pribumi. Sampai bulan mei 1989 sudah 48.000 keluarga yang mendapatkan tanah.

Tabel 4.2: Jumlah orang yang sudah mendapatkan tanah sampai mei 1989

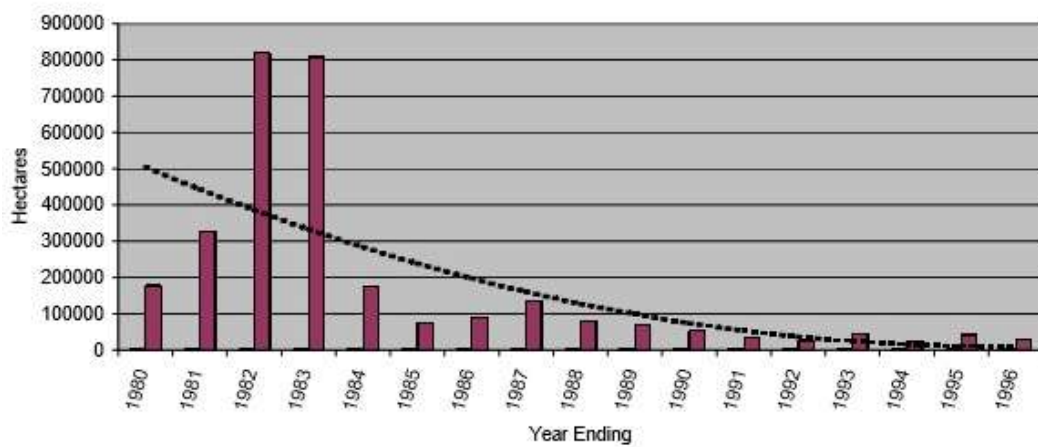
Provinsi	No. of Ha	Settlers Planned	Settlers Placed	% of Capacity

Manicaland	542.872	15.062	13.656	90.67
Mashonaland Central	394.784	11.407	6.337	55.55
Mashonaland East	212.120	6.982	5.578	79.89
Mashonaland West	393.053	7.762	6.606	85.11
Masvingo	403.246	5.469	5.180	94.72
Matabeleland South	150.591	1.620	1.262	77.90
Matabeleland North	263.889	2.752	1.986	72.17
Midlands	546.547	17.957	7.073	39.35
Total	2.847.102	69.011	47.678	69.08

Sumber: Masilela dan Rankin. 1998, hlm. 17

Pada tahun 1990, sekitar 69.011 keluarga sudah ditempatkan pada sebidang tanah yang luasnya 2,84 juta hektar (Bonarjee, 2013, hlm. 10). Pembagian wilayah tersebut terjadi serentak di berbagai wilayah di Zimbabwe. Seperti yang terlihat di tabel 4.2 bahwa Provinsi Midlands yang terbesar dalam Landreform pada tahun tersebut, disusul oleh provinsi Manicaland, Masvingo, Mashonaland Central, Mashonaland West, Matabeleland North, Mashonaland East, dan terakhir ditempati oleh Matabeleland South. Wilayah-wilayah tersebut dibagikan kepada penduduk pribumi, namun jumlah tersebut tidak seluruhnya sesuai dengan jumlah penduduk yang menerima, seperti Mashonaland East yang jumlah wilayahnya lebih kecil dari pada Matabeleland North, namun jumlah penduduk yang menerimanya lebih besar Mashonaland East. Untuk jumlah penduduk yang mencapai target relokasi masih belum mencapai target, tetapi Provinsi Midlands yang target penduduknya sangat jauh dari yang diharapkan, yaitu 39,35%. Keberhasilan yang dicapai tersebut terjadi oleh beberapa sebab. seperti ketentuan dari konstitusi tentang klausul *Willing-seller Willing-buyer*, melihat kekuatan politik petani komersil kulit putih, terbatasnya dana untuk pembebasan lahan, terbatasnya tekanan dari para petani.

Diagram 4.1: pembelian tanah untuk relokasi penduduk Pribumi oleh pemerintah sejak tahun 1980



Sumber: Chitsike, Francis. 2003, hlm.6

Selama *Landreform* masa Robert Mugabe sebagai Presiden banyak terjadi perubahan-perubahan dan juga perpindahan tanah untuk penduduk. Sampai tahun 1994/5 pemerintah sudah membeli sekitar 2,9 juta hektar tanah untuk program *Landreform*. Pada diagram tersebut menjelaskan tanah yang sudah di akuisisi selama periode tersebut. Ada juga penambahan sekitar 0,6 juta hektar dialokasikan dari kumpulan tanah negara yang tersedia, dari sumbangan dan juga sekumpulan tanah yang kumuh. Dengan total 3,5 juta hektar yang berhasil diakuisisi. Jumlah tanah tersebut tidak serta merta langsung menyeluruh, namun bertahap. Seperti yang tertera pada diagram bahwa tahun 1982 dan 1983 menjadi tahun yang paling banyak akuisisi lahan. Tahun tersebut memperoleh total hampir 1,7 juta lahan. dan tahun-tahun berikutnya berjalan stabil di kisaran 100.000 hektar.

Untuk menanggapi hasil dari *Landreform* yang menurun setiap tahun. Maka perlu diadakan suatu perubahan yang dapat memperbaiki *Landreform*. Menurut Zikhali “*However, in 1997 the government of Zimbabwe initiated a process of radical landreform.*” (2008, hlm. 4). Maka pemerintah Zimbabwe mempunyai rencana untuk meningkatkan proses *Landreform* menuju tahap yang radikal. Kemudian rencana tersebut bernama *Fast Track Landreform Programme (FTLRP)*. Hal tersebut dianggap perlu, selain untuk memperbaiki performa dari *Landreform* juga untuk mempercepat waktu dari proses

redistribusi lahan tersebut. Pada tahun 1999 sekitar 4.500 lahan pertanian komersial skala besar, termasuk perkebunan dan perusahaan-perusahaan yang memiliki lebih dari 9000 properti lahan pertanian yang mencakup area sekitar 11 juta hektar. Karena sifat FTLRP yang menyeluruh dan mendasar maka program tersebut menargetkan 5 juta hektar lahan pertanian dapat di redistribusikan.

4.3.1.2 Perubahan Sistem Pemilu

Zimbabwe mengalami perubahan konstitusi pada tahun 1987. Perubahan tersebut berpengaruh juga terhadap sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang awalnya parlementer berubah menjadi presidensial. Selain perubahan konstitusi tersebut, Zimbabwe juga mengalami beberapa perubahan konstitusi. Perubahan tersebut akan dijelaskan pada tabel dibawah:

Tabel 4.3: Perubahan dalam Konstitusi Zimbabwe

Tahun	Perubahan
1987	Penghapusan 20 kursi yang disediakan untuk orang kulit putih di parlemen; penghapusan kantor Perdana Menteri Penghapusan 20 kursi yang disediakan untuk orang kulit putih di parlemen; penghapusan kantor Perdana Menteri
1990	Senat dan penciptaan kursi majelis berdasarkan pengangkatan dan bukan karena dipilih
2005	Reintroduksi Senat

Sumber: Minomahasetra, 2014, hlm. 20

Tabel diatas menunjukkan bahwa konstitusi Zimbabwe telah mengalami beberapa kali perubahan (amandemen). Pertama pada tahun 1987, perubahan konstitusi diantaranya penghapusan 29 kursi yang disediakan untuk orang kulit putih di parlemen dan juga penghapusan kantor Perdana

Menteri. Perubahan konstitusi kedua terjadi pada tahun 1990, mengenai penghapusan senat dan penciptaan kursi majelis berdasarkan pengangkatan dan bukan karena dipilih. Perubahan konstitusi ketiga terjadi pada tahun 2005, perubahan tersebut adalah mengenai reintroduksi senat dalam sistem pemerintahan Zimbabwe.

Sistem politik dan pemerintahan Zimbabwe memiliki tiga lembaga kekuasaan yaitu: kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif di Zimbabwe dipegang oleh Presiden yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih untuk jangka waktu lima tahun melalui pemilihan umum langsung. Dalam paragraf pertama Pasal 32 Konstitusi Zimbabwe, menyebutkan bahwa kekuasaan legislatif dilaksanakan bersama oleh Presiden Zimbabwe dan Parlemen. Sistem parlemen Zimbabwe adalah bikameral, terdiri dari majelis rendah atau House of Assembly dan majelis tinggi atau Senat. Pada tahun 1980 dan 1989 Senat memiliki 40 anggota, tetapi karena adanya amandemen konstitusi tahun 1990 keberadaan Senat dihapus dan mengubah House of Assembly di parlemen dari sistem bikameral menjadi unikameral. Pada tanggal 14 September 2005 terjadi amandemen kembali konstitusi Zimbabwe. Hasil amandemen konstitusi antara lain mengembalikan kembali posisi Senat berdasarkan Pasal 38 dari konstitusi tersebut. Senat memiliki 66 anggota yaitu:

1. 5 senator dipilih oleh suara mayoritas sederhana dalam satu putaran pada masing-masing dari 10 provinsi;
2. 1 senator dipilih oleh sebuah perguruan tinggi dari kepala di masing-masing delapan provinsi non-metropolitan (tidak termasuk kota-kota Harare dan Bulawayo);
3. 6 Senator ditunjuk oleh Presiden Zimbabwe.

Berdasarkan Pasal 38 dari konstitusi, DPR saat ini memiliki 150 deputi Majelis, yaitu:

1. 120 anggota terpilih dalam sebanyak satu konstituen mandat mayoritas dalam satu putaran;
2. 10 gubernur provinsi (ditunjuk oleh Presiden Zimbabwe);

3. 8 kepala dipilih oleh sebuah perguruan tinggi dari kepala di masing-masing delapan provinsi non-metropolitan (tidak termasuk kota-kota Harare dan Bulawayo);
4. 12 anggota yang ditunjuk oleh Presiden Zimbabwe (Minomahasetra. 2014, hlm. 21).

Perubahan konstitusi kembali terjadi pada tahun 2007 dan mulai berlaku tahun 2008 yang berakibat pada perubahan metode penunjukan di dua kamar (bikameral). Jumlah deputi sebanyak 150-210 yang semua dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah Senat terdiri dari 50-93 anggota, dimana 50 senator terpilih dari 10 provinsi diangkat sesuai dengan sistem yang sama, sedangkan presiden Zimbabwe menunjuk 43 senator yang lain. Kekuasaan yudikatif terdiri dari para hakim Mahkamah Agung yang diangkat oleh presiden atas saran dari Komisi Yudisial.

Sebagai Presiden terpilih, Mugabe menginginkan adanya sistem satu partai dalam politik Zimbabwe. Partai baru yang bermunculan pada era akhir 1980-an dan awal 1990-an diharapkan untuk mempersiapkan diri pada pemilu tahun 1995. Di pemilu tahun 1990, Persatuan Gerakan Edgar Tekere Zimbabwe (ZUM) diperebutkan karena memiliki beberapa keberhasilan. UANC yang dipimpin oleh Muzorewa kemudian bergabung dengan ZUM bulan Januari 1994. Pada bulan Januari juga Mugabe bersaing dengan Sithole yang kembali dari pengasingan dan menciptakan partai sendiri yang bernama Zanu-Ndonga atau disebut juga dengan Zanu-Sithole. Dua partai tersebut dibentuk untuk menyaingi partai Zanu-PF pimpinan Mugabe di tahun 1990-an. Kemudian muncul partai The United Front Democratic (UDF) diluncurkan oleh Lupi Mushayakarara, mantan pemimpin Rhodesia Ian Smith, Abel Muzorewa, dan Ndabaningi Sithole. Bulan September 1999 Partai MDC didirikan dari Kongres Serikat Dagang Zimbabwe (ZCTU) yang terdiri dari 33 pekerja di bawah pimpinan Morgan Tsvangirai. Partai ini dibagi terbagi menjadi dua yaitu partai MDC Tsvangirai dan MDC Mutambara. Kedua partai didirikan bertujuan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Di sisi kubu Zanu-PF dihadapkan oleh keputusan Simba Makoni, mantan seorang anggota politbiro Zanu-PF dan Menteri Keuangan yang

menyatakan melawan Presiden Mugabe. Makoni memutuskan untuk mendukung Arthur Mutambara dari partai MDC-Mutambara, yang akhirnya berdiri sebagai calon independen dalam pemilihan presiden.

Zimbabwe tidak memiliki hukum yang mengharuskan pendaftaran partai-partai politik. Partai hanya didefinisikan dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2004 pasal 4 ayat 1 sebagai organisasi politik. Sedangkan Undang-Undang Komisi Pemilihan Zimbabwe tahun 2004 pasal 2 mendefinisikan partai sebagai asosiasi masyarakat untuk menempatkan satu orang atau lebih wakilnya dalam pemerintahan daerah atau parlemen melalui pemilihan umum. Selain itu juga untuk menempatkan wakilnya dalam kepresidenan serta untuk mengkampanyekan hasil dari sebuah referendum. Mengenai sistem pembiayaan partai, tidak ada ketentuan tersendiri di Zimbabwe hingga undang-undang mengenai pembiayaan partai politik di adopsi pada tahun 1992. Undang-undang ini mengatur tentang pendanaan negara dari partai politik yang diselenggarakan oleh 15 kursi di parlemen atau lebih. Pada saat itu, hanya partai Zanu-PF yang memenuhi syarat dengan perolehan 117 dari 120 kursi di House of Assembly. Pihak Inggris kemudian menentang ketentuan tersebut ke Mahkamah Agung pada tahun 1997. Hasil dari pengadilan memutuskan bahwa ambang batas akan dikurangi menjadi sebesar 5 % dalam pemilu terakhir. Keputusan tersebut membawa dampak pada perubahan undang-undang keuangan partai politik di tahun 1997. Dalam undang-undang tahun 1997 juga disebutkan bahwa tidak ada ketentuan mengenai calon presiden independen serta melarang pendanaan dan sumbangan yang berasal dari pihak asing. Demikian pula dengan warga asing dilarang meminta sumbangan dana dari masyarakat Zimbabwe atas nama partai politik.

Pihak yang akan melakukan pendanaan harus membuat permohonan kepada menteri administrasi undang-undang pada akhir tahun keuangan dan menteri dapat menolak permohonan tersebut apabila partai tidak memenuhi syarat untuk pendanaan. Banding terhadap putusan menteri dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi, dan banding ke Mahkamah Agung dapat dibuat terhadap keputusan Pengadilan Tinggi. Menteri memiliki tugas untuk membuat

peraturan administrasi undang-undang, termasuk mengenai peraturan yang mengatur tentang catatan donasi partai politik, pembukuan, bentuk audit, isi dan publikasi rekening oleh partai politik. Seperti halnya di banyak negara benua Afrika, tidak ada definisi tertentu dari anggaran belanja kampanye di Zimbabwe.

Dasar hukum konstitusi Zimbabwe tahun 1980 mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan tersebut terjadi pada tahun 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1990, 1992, 1995, 1996, 2000, 2005 dan 2007. Selain itu juga terdapat undang-undang mengenai Pemilihan Umum (Bab 2:13) dan Komisi Pemilihan Zimbabwe Act (Bab 2:12), Referendum Act (Bab 2:10), Partai Politik (Pendanaan) Act (Bab 2:11). Dalam sistem pemilu Zimbabwe DPR memiliki 210 anggota tunggal konstituen pluralitas, sedangkan Senat memiliki 60 kursi anggota tunggal dan anggota tunggal pluralitas (6 di setiap provinsi), 16 diantaranya dipilih oleh 2 orang kepala masing-masing dari 8 provinsi non-metropolitan. (Patsanza. 1988, hlm. 106) Pemilu Presiden, DPR, dan Senat diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Presiden dipilih secara universal oleh warga negara, suara mayoritas mutlak diperlukan dalam hal ini.

Lembaga pemilihan umum yang ada di Zimbabwe adalah Zimbabwe Electoral Commission (ZEC). Fungsi ZEC terbatas dari konstitusi, diantaranya ialah mempersiapkan dan melakukan pemilihan umum dan referendum, memastikan bahwa penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan secara efisien, bebas, adil, transparan dan sesuai dengan hukum. Fungsi lainnya adalah mengarahkan dan mengontrol pendaftaran pemilih, mendata dan mengumpulkan para pemilih serta melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada para pemilih.

Kemandirian lembaga-lembaga pemilihan diatur dalam tata cara tersendiri. Ketua ZEC ditunjuk oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Komisi Yudisial dan jasa komisioner lainnya, paling tidak tiga orang di antaranya perempuan, diangkat oleh Presiden dari daftar sembilan nominasi yang diajukan oleh Committee on Standing Rules and Orders. Tugas ZEC terbatas pada pemilihan parlemen (210 House of Assembly, 60 Senat) dan

pemilihan pemerintah daerah setiap lima tahun, sejauh dapat dipraktekkan, mengambil representasi publik ketika melakukan pemilihan tersebut (Patsanza. 1988, hlm. 109). House of Assembly Constituencies masing-masing harus memiliki jumlah yang sama dari pemilih, dengan memperhatikan ciri-ciri fisik, komunikasi, distribusi geografis pemilih terdaftar, kepentingan masyarakat dan batas-batas pemilu yang ada.

Pendaftaran pemilih bersifat sukarela secara terus menerus dan pendaftaran ditutup 24 jam sebelum hari pencalonan. Pendaftaran konstituen harus berada dibawah pengawasan ZEC. Calon pendaftar harus menunjukkan kartu identitas nasional dan bukti tempat tinggal dan dikeluarkan dengan sertifikat pendaftaran. Para calon pemilih konstituen melakukan registrasi selama jam kerja dan salinan harus diberikan kepada publik pada pembayaran biaya yang telah ditentukan. ZEC harus memastikan bahwa tingkat pendidikan pemilih yang dilakukan oleh orang lain (termasuk partai politik) adalah cukup, tidak menyesatkan atau bias, mereka harus warga negara Zimbabwe atau LSM yang terdaftar (Harold-Barry. 2004, hlm. 79). Mereka harus mematuhi program dan instruksi dari ZEC dan tidak ada biaya, semua materi, trainer rincian dan pendanaan harus dilaporkan kepada ZEC, semua dana asing harus disalurkan dan distribusikan oleh ZEC.

Dalam pemilihan parlemen, seorang kandidat dicalonkan melalui nominasi yang ditandatangani oleh sepuluh pemilih pendaftar, rincian data dan disertai dengan foto. Jika didukung oleh partai, berkas harus ditandatangani oleh pejabat partai, banyak biaya yang dibutuhkan serta pendaftaran sebagai pemilih dalam konstituensi. Sedangkan dalam pemilihan presiden, persyaratannya antara lain ditandatangani oleh sepuluh pemilih yang terdaftar dari masing-masing provinsi, disertai data diri dan sebuah foto. Jika didukung partai harus ditandatangani oleh pejabat partai dan diperlukan mengenai berapa banyak biaya yang akan ditentukan (Harold-Barry. 2004, hlm. 85). Dana publik untuk partai-partai politik dengan minimal 5% dari suara dalam pemilu terakhir secara proporsional dengan jumlah suara yang mereka terima. Pendanaan asing dan sumbangan dilarang oleh undang-undang mengenai anggaran keuangan Partai Politik.

Mengenai kampanye dalam pemilihan umum, kegiatan partai politik dan para calon kandidat harus tunduk pada kode etik yang telah diatur oleh undang-undang, namun tidak ada sanksi yang melekat pada pelanggaran. Tidak ditetapkan jangka waktu untuk kampanye, tetapi kegiatan kampanye dilarang dalam radius 300 meter dari tempat pemungutan suara (TPS) pada saat pemungutan suara berlangsung. Undang-undang pemilu mengatur bahwa setiap pihak memiliki hak untuk akses masuk ke media, dan lembaga penyiaran publik harus memberi akses gratis bagi partai politik dan kandidat independen seperti yang tertuan dalam peraturan yang dibuat ZEC dengan persetujuan menteri. Dalam peraturan juga ditentukan mengenai total waktu yang akan dialokasikan untuk masing-masing wilayah serta periode waktu ketika siaran berlangsung. Pengalokasian haruslah bersifat adil dan memberikan kesempatan bagi partai serta kandidat untuk menyampaikan tentang semua pandangan mereka. Apabila media menerima iklan politik, mereka harus membayar semua aktor. Mengenai media diatur dalam sebuah kode etik dan ZEC harus memantau dan memastikan media mematuhi kode etik tersebut.

Setelah penutupan penghitungan suara berlangsung di tempat pemungutan suara (TPS) oleh ketua TPS dihadapan petugas pemungutan suara, saksi, pengamat dan kandidat serta perwakilan pemilihan mereka yang hadir, hasilnya diluar TPS. Saat penghitungan selesai, ketua ZEC mengumumkan hasil pemilu dan mengirimkannya ke petugas pemilu dan mengumumkan salinan hasil luar TPS. Dihadapan para saksi, pengamat, para calon kandidat dan agen pemilihan, petugas pemilihan umum memverifikasi kembali hasil perhitungan suara. Setelah penghitungan selesai hasilnya akan disalurkan ke kantor kepala pemilihan umum yang kemudian diterbitkan dalam bentuk lembaran. Komite penghubung multipartai ditetapkan oleh ZEC di tingkat nasional, provinsi dan konstituen. Tujuannya adalah untuk mencoba menyelesaikan sengketa pemilu, petisi pemilu yang didengar oleh pengadilan pemilihan. Tentang pemantau pemilu individu diakreditasi oleh ZEC dan dapat memantau pemilu dengan tunduk pada kode etik. Pemantau individu yang mewakili negara-negara asing, organisasi internasional,

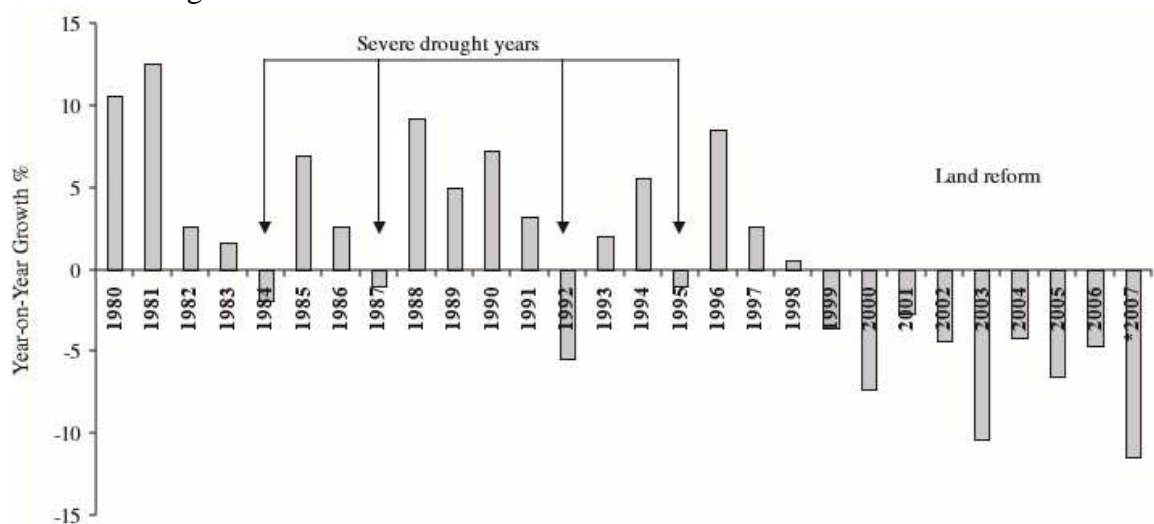
regional dan lokal dan badan-badan yang mirip dengan ZEC yang diundang oleh Menteri Pemerintah dapat mengamati pemilu dan diakreditasi oleh komite akreditasi ZEC berdasarkan dengan kode etik.

4.3.1.3 Hiperinflasi

Zimbabwe yang pada awal kemerdekaannya menunjukkan hal positif perihal perekonomian. Pertumbuhan meningkat beberapa persen, bahkan dapat dikatakan Zimbabwe salah satu negara yang maju. Bahkan menurut Adnan pertumbuhan ekonomi Zimbabwe pada awal kemerdekaan hasil pertaniannya mencatatkan rekor pertumbuhan sebesar 24% dalam dua tahun. (2008, hlm. 101) pertumbuhan tersebut tidak luput dari peran alam yang menumpahkan curah hujan yang memadai untuk pertanian, dan juga iklim yang sedang bersahabat.

Kemajuan pertumbuhan ekonomi yang dialami tidak berjalan lama. Perekonomian Zimbabwe sempat terganggu. Terlihat dari *Gross Domestic Product (GDP)* yang beberapa kali defisit.

Diagram 4.2: Annual GDP Growth in Zimbabwe



Sumber: Coltart, David. 2008.

Terlihat dari diagram diatas, beberapa kali mengalami defisit, seperti 1984, 1987, 1992, 1995, dan 1999 sampai 2007. Pada tahun 1984 dipengaruhi oleh peristiwa Gukurahundi yang membuat kekacauan politik. Peristiwa tersebut juga berdampak pada perekonomian Zimbabwe, namun tidak

berdampak yang berlarut-larut. Begitu pun yang terjadi pada tahun 1987, dimana terjadi pergolakan politik yang sudah mencapai puncaknya, yaitu perselisihan antara partai Zanu dan Zapu, yang akhirnya dapat di selesaikan dengan melakukan penggabungan dua partai tersebut. Kemudian untuk tahun 1999 sampai 2007, merupakan akibat dari program *Fast Track Landreform*, yang malahan berakibat negatif, karena banyak tanah-tanah yang direbut dari penduduk kulit putih, tidak bisa dimanfaatkan dengan baik oleh petani pribumi. Kemerostan tersebut, semakin tahun kian parah. Bahkan hingga menimbulkan perekonomian terjun bebas, dan kemudian dikenal dengan nama Hiperinflasi. Bahkan selain dari GDP Zimbabwe, berbagai sektor dalam kehidupan di Zimbabwe menjadi hancur. Seperti aspek pariwisata yang terdapat di Zimbabwe mengalami kemunduran yang disebabkan oleh para investor enggan untuk berinvestasi di Zimbabwe.

Di era awal kemerdekaan tahun 1980, nilai Z\$ 1 setara dengan 1 Poundsterling. Beberapa tahun kemudian, tingkat inflasi di Zimbabwe justru meningkat drastis. Pada tahun 2006 saja, inflasi mencapai 1.200%, 2007 mencapai 66.212%, dan yang lebih parah terjadi pada tahun 2008 mencapai angka 2.200.000% . Inflasi tahun 2008 merupakan inflasi yang terbesar di dunia hingga saat ini. Kurs mata uang pun menurun drastis, nilai 1\$ mencapai Z\$.

Dampak dari inflasi yang tinggi tersebut, Bank Sentral Zimbabwe telah mengeluarkan empat versi mata uang. Terakhir bank sentral Zimbabwe mengeluarkan pecahan uang dengan nilai \$ 100.000.000.000.000 (100 triliun dolar) yang menjadi uang dengan nominal terbesar di dunia yang. Mata uang tersebut kemudian digantikan dengan versi dolar dimana setiap \$ 100.000.000.000.000 (100 triliun dolar) uang lama digantikan menjadi \$1 uang baru (Harold-Barry. 2004, hlm. 110). Melihat kondisi ekonomi yang terus memburuk, bank sentral Zimbabwe memutuskan untuk membolehkan rakyatnya menggunakan mata uang dolar Amerika sebagai mata uang mereka untuk menstabilkan kembali perekonomian Zimbabwe. Tingginya tingkat inflasi (hyperinflation), membuat perekonomian negara tersebut mengalami kelumpuhan dan nilai mata uang dolar Zimbabwe terus mengalami

kemerosotan. Uang tunai seolah-olah tidak ada nilainya lagi dalam masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kupon untuk bahan bakar sebagai alat tukar dengan barang-barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan lain. Bahkan para pedagang lebih memilih untuk menerima pembayaran dengan menggunakan kupon daripada mata uang lokal karena terjadinya devaluasi mata uang yang cepat terhadap dolar Zimbabwe.

Jatuhnya perekonomian Zimbabwe, dipicu oleh pola manajemen yang tidak efisien serta perilaku rezim pemerintahan yang korup. Zimbabwe selama 1998-2002 juga terlibat perang dengan Republik Kongo, hingga menguras biaya ratusan juta dolar Amerika. Situasi semakin parah setelah Robert Mugabe menerapkan program reformasi lahan (land reform) yang tidak tepat sasaran (Harold-Barry. 2004, hlm, 117). Pada tahun 2000, Mugabe mengambil alih secara paksa lahan pertanian milik petani kulit putih untuk didistribusikan ke petani kulit hitam (Coltart. 2008, hlm.15). Kebijakan ini menyebabkan 4.000 petani kulit putih kehilangan lahan. Di lain sisi warga kulit hitam tidak memiliki persediaan benih, pupuk, dan bahan bakar yang cukup. Zimbabwe terpaksa mengimpor biji pangan dari Afrika Selatan, Zambia, dan Malawi. Sejak saat itu, kondisi ekonomi Zimbabwe mengalami penurunan. Ekspor pertanian, khususnya tembakau, turun drastis.

Pengelolaan ekonomi yang buruk oleh Presiden Mugabe serta gejolak politik dan sosial di negara ini telah memperburuk keadaan Zimbabwe. Hal yang dilakukan oleh pemerintahan Mugabe untuk mempertahankan kekuasaannya adalah dengan mencetak uang secara besar-besaran. Uang dipakai untuk membayar gaji pegawai, tentara, dan belanja pemerintah. Peredaran uang menjadi tak terkendali dan dinilai sebagai akar dari adanya hiperinflasi. Menghadapi masalah ini, Mugabe justru memerintahkan bank sentral Zimbabwe untuk terus mencetak uang. Gubernur Bank Sentral Zimbabwe, Dr. Gideon Gono, dengan sendirinya mematuhi perintah presiden Mugabe. Dengan peredaran uang yang meningkat berkali lipat, inflasi terus menanjak. Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menanggulangi krisis ekonomi belum menghasilkan perubahan yang berarti. Bank Sentral Zimbabwe memutuskan untuk meredenominasi mata uang dengan mengubah

uang 10 miliar dolar Zimbabwe menjadi 1 dolar Zimbabwe atau menghilangkan 10 angka nol. Kebijakan tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat keluar dari hiperinflasi yang terjadi. Namun kebijakan ini masih belum mampu menyelesaikan permasalahan inflasi yang ada di Zimbabwe.

4.3.2 Strategi Presiden Mugabe Mengatasi Permasalahan Luar Negeri

Permasalahan di benua Afrika banyak terjadi, mulai dari krisis yang diakibatkan oleh keadaan alam, maupun krisis yang diakibatkan oleh politik. Di benua Afrika banyak negara yang sudah merdeka namun masih menjadi negara berkembang. Begitu pula dengan Zimbabwe yang masih menjadi negara berkembang dan masih berupaya memulihkan kondisi negaranya akibat konflik politik yang terjadi. Dalam hal ini peran Presiden Mugabe dalam dunia internasional belum menonjol karena masih harus berbenah dengan permasalahan yang terjadi di dalam negerinya. Peran Mugabe dalam dunia internasional hanya sebagai wakil dari Zimbabwe yang turut serta dalam organisasi-organisasi internasional. Uni Afrika (UA) yang merupakan organisasi regional yang berada di Afrika. Adapula persemakmuran yang bernama *Commonwealth of Nations* yang berisi negara-negara yang pernah dimerdekakan oleh Inggris. Zimbabwe pun ikut termasuk dalam negara *Commonwealth* namun keluar pada tanggal 7 desember 2003. Keanggotaan Zimbabwe di persemakmuran dibekukan sementara sesudah terjadinya ketidakberesan dalam pemilihan presiden Maret 2002 (Adnan. 2008, hlm. 104). Selain itu, Zimbabwe ikut termasuk dalam Gerakan Non Blok. Dan Mugabe pun pernah menjabat sebagai Sekretaris Jendral Gerakan Non Blok.

Untuk organisasi regional, Zimbabwe ikut dalam Uni Afrika yang anggotanya merupakan negara di Afrika. Uni Afrika ini yang dulunya bernama OAU atau Organisation of African Unity. Selain Uni Afrika, ada pula Southern African Development Community yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama sosio-ekonomi dan kerjasama politik serta keamanan di 16 negara afrika bagian selatan. The Southern African Development Community (SADC) atau masyarakat pembangunan Afrika selatan pada awalnya bernama Southern African Development Co-ordination

Conference (SADCC). Organisasi pemerintah regional tersebut dibentuk pada 1 April 1980 di Lusaka, Zambia. SADCC dibentuk sebagai persekutuan atau aliansi dari sembilan negara di kawasan Afrika selatan. Kesembilan Negara pendiri SADCC antara lain Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Swaziland, Republik Tanzania, Zambia dan Zimbabwe (Minomahasetra. 2014, hlm. 45).

SADCC memiliki tujuan utama yaitu mengkoordinasi proyek-proyek pembangunan guna mengurangi ketergantungan ekonomi negara-negara di Afrika Selatan terhadap ras kulit putih. Adapun tujuan yang lebih spesifik dari SADCC antara lain sebagai berikut,

1. Mengurangi ketergantungan anggota kepada negara lain di segala bidang khususnya bidang ekonomi, terutama dari pemerintah apartheid,
2. Mengimplementasikan program yang berdampak nasional dan regional,
3. Memobilisasikan sumber daya anggota untuk memperkuat kemandirian kolektif
4. Menggalang pemahaman dan dukungan internasional.

Melalui pertemuan puncak para pemimpin negara-negara Afrika Selatan di Windhoek, Namibia pada 17 Agustus 1992, SADCC secara resmi berubah menjadi SADC. Dalam pertemuan tersebut, deklarasi dan Perjanjian ditandatangani sebagai landasan hukum organisasi SADC. Tujuan utama dari SADC adalah untuk mencapai pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan standar dan kualitas hidup rakyat Afrika bagian Selatan dan mendukung yang kurang beruntung secara sosial melalui integrasi regional. Tujuan ini akan dicapai melalui peningkatan integrasi regional yang dibangun di atas prinsip-prinsip demokrasi dan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Negara-negara Afrika bagian Selatan telah mengadopsi kerangka kerja sama berdasarkan:

1. kerjasama ekonomi yang lebih dalam dan integrasi, atas dasar neraca, ekuitas dan saling menguntungkan, menyediakan untuk meningkatkan investasi dan perdagangan, pergerakan bebas faktor-faktor produksi, dan barang dan jasa lintas batas negara;

2. ekonomi, politik, nilai-nilai sosial, meningkatkan daya saing perusahaan, demokrasi dan tata pemerintahan yang baik, menghormati aturan hukum dan jaminan hak asasi manusia, partisipasi rakyat dan pengentasan kemiskinan, dan solidaritas regional, perdamaian dan keamanan, agar orang-orang bisa hidup dan bekerja bersama dalam damai dan harmoni.

Hubungan Zimbabwe dengan Indonesia sudah terjalin sejak lama dan harmonis. Berbeda dengan hubungan Zimbabwe dengan negara lain terutama negara-negara Eropa yang kurang baik. Hubungan Zimbabwe dengan Indonesia semakin terjalin baik dikarenakan kedua negara ini memiliki kesamaan pandangan dalam berbagai forum sub regional, regional dan internasional. Dukungan Zimbabwe terhadap Indonesia dalam forum internasional terlihat ketika pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2007-2008. Begitupun sebaliknya dengan dukungan Indonesia kepada Zimbabwe dalam Komite Tiga Sidang Umum ke-59 Majelis Umum PBB (Kedubes RI di Zimbabwe, 2005, hlm. 10). Untuk kunjungan bilateral Zimbabwe dan Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 1988, kedua negara saling melakukan kunjungan kenegaraan. Presiden Robert Mugabe berkunjung ke Indonesia dan bertemu pemimpin Indonesia, mulai dari Presiden Soeharto hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain kunjungan yang bersifat bilateral, Zimbabwe juga sering mengunjungi Indonesia untuk mengikuti forum internasional, seperti GNB. Robert Mugabe datang ke Indonesia pada 1992 untuk menghadiri KTT Non-Blok ke-10. Maupun pada tanggal 23 Februari 2003, Robert Mugabe bertemu dengan Presiden Megawati Soekarnoputri di Kuala Lumpur, Malaysia untuk membahas revitalisasi GNB (Kedubes RI di Zimbabwe, 2005, hlm. 9). Dalam GNB, Robert Mugabe pernah menjabat Sekretaris Jendral dari tahun 1986-1989 dan Zimbabwe pernah menjadi tempat dilaksanakannya KTT Non-Blok pada 1-6 September 1986. Selain dalam GNB, Robert Mugabe pernah menjabat ketua OAU dari tahun 1997-1998.